



LAPORAN KINERJA

TRIWULAN I

2026 |



**PELABUHAN PERIKANAN
NUSANTARA TERNATE**

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan, bahwa setiap entitas akuntabilitas kinerja unit organisasi, diwajibkan untuk melakukan pencatatan, pengolahan, pengikhtisaran, dan pelaporan data kinerja.

Laporan Kinerja PPN Ternate Triwulan 1 Tahun 2026 merupakan perwujudan dan pertanggung jawaban PPN Ternate dalam pelaksanaan program dan kegiatan untuk mencapai visi dan misi organisasi di tahun 2026, yang dilakukan secara terukur sesuai dengan sasaran/ target Kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja PPN Ternate tahun 2026. Diharapkan melalui Laporan Kinerja ini, PPN Ternate selain memenuhi kewajiban pelaporan kinerjanya sesuai ketentuan perundang-undangan, juga mampu menjadikan sebagai alat dalam melakukan self evaluation untuk peningkatan kinerja di lingkungan internal PPN Ternate, sekaligus sebagai alat pengendali serta penilaian kinerja secara kuantitatif dalam rangka mewujudkan transparansi pelaksanaan tugas dan fungsi PPN Ternate berdasarkan prinsip-prinsip good governance.

Semoga apa yang tersaji dalam Laporan Kinerja PPN Ternate Triwulan 1 tahun 2026 dapat menjadi bahan masukan dalam pengambilan kebijakan bagi seluruh pihak yang terkait. Kami menyadari masih terdapat kekurangan dari penyajiannya sehingga masukan saran yang membangun sangat kami butuhkan dalam peningkatan kinerja PPN Ternate kedepan. Dan akhir kata kami ucapkan terima kasih kepada seluruh Pegawai PPN Ternate yang terus bersinergi dalam melaksanakan tugas dan fungsi PPN Ternate sebagai pelaksana Pelayanan Publik bagi Masyarakat Perikana. “PPN Ternate MAJANG”

Ternate, 20 April 2026
Kepala Pelabuhan,

 **Ditandatangani
Secara Elektronik**
Kamarudin

IKHTISAR EKSEKUTIF

TRIWULAN 1
REPORT

Pelabuhan Perikanan Nusantara
Ternate

Nilai Kinerja
Organisasi

97,11 Kategori **BAIK**

IKU TEKNIS

570,24

NILAI PNBP
Rp.Juta

678,09

Produksi
Perikanan /Ton

90,5

Nilai Kinerja

84

Pengendalian
Lingkungan

420

Kapal Izin
Daerah

IKU MANAJERIAL

Rekomendasi Hasil
Pengawasan

100

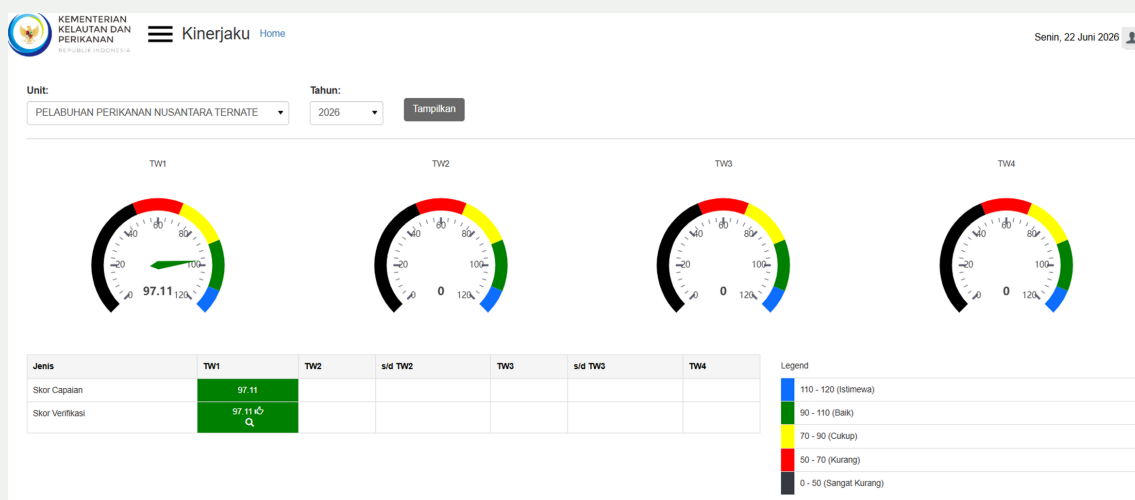
Rencana Umum
Pengadaan PBJ

100

Nilai SKM

93,56

DASHBOARD



EXECUTIVE SUMMARY

Secara keseluruhan, tata kelola dan implementasi program kerja di PPN Ternate berjalan sesuai target. Berdasarkan hasil monitoring pada aplikasi kinerjaku, Skor Capaian Nilai Kinerja Organisasi menyentuh 97,11% (Predikat: Baik). Dari 5 Sasaran Strategis (SS) utama instansi, sebanyak 4 sasaran berhasil melampaui nilai aman atau mendekati 100%. Satu sasaran memerlukan perhatian khusus akibat dinamika operasional di lapangan yaitu produksi perikanan tangkap.

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR.....	v
DAFTAR GRAFIK.....	v
DAFTAR LAMPIRAN	
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. LATAR BELAKANG.....	1
1.2. TUGAS DAN FUNGSI	2
1.3. STRUKTUR ORGANISASI	3
1.4. ISU STRATEGIS PPN TERNATE	4
BAB II. PERENCANAAN KINERJA.....	5
2.1. RENCAN STRATEGIS	5
2.2. PERJANJIAN KINERJA	6
2.3. RENCANA KERJA	7
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA.....	8
BAB IV. PENUTUP	47

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Perjanjian Kinerja PPN Ternate Tahun 2026.....	7
Tabel 2. Rencana Anggaran PPN Ternate Tahun 2026	7
Tabel 3. Capaian Kinerja PPN Ternate Triwulan 1 Tahun 2026	9
Tabel 4. Jumlah Penerimaan PNBPN Berdasarkan Jenis Penerimaan di PPN Ternate Selama Bulan Januari-Maret 2026	12
Tabel 5. Capaian Indikator Penerimaan PNBPN Non SDA di PPN Ternate	12
Tabel 6. Ringkasan Capaian PNBPN Jenis Penerimaan Fungsional Triwulan 1 Tahun 2026	13
Tabel 7. Volume Produksi Perikanan Tangkap di PPN Ternate Bulan Januari – Maret 2026	16
Tabel 8. Capaian Indikator Volume Produksi Perikanan Tangkap di PPN Ternate....	16
Tabel 9. Capaian Indikator Tingkat Kinerja PPN Ternate.....	20
Tabel 11. Nilai Implementasi Selamatkan PPN Ternate yang telah dievaluasi Selama Bulan Januari-Maret 2026	24
Tabel 12. Capaian Indikator Nilai Pengendalian Lingkungan di PPN Ternate.....	24
Tabel 13. Jumlah SKKP yang diterbitkan di PPN Sampai dengan Triwulan 1 2026...	28
Tabel 14. Capaian Indikator Kapal Perikanan Izin Daerah yang Memenuhi Ketentuan	28
Tabel 17. Perbandingan Capaian Indikator Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate Tahun 2026 dengan Tahun Sebelumnya.....	32
Tabel 18. Pembobotan Nilai Evaluasi AKIP.....	34
Tabel 19. Perbandingan Capaian IP ASN Tahun 2026 dengan Tahun Sebelumnya.	34
Tabel 20. Data Capaian IKU Persentase Rencana Umum Pengadaan PPN Ternate Triwulan 1 Tahun 2026	36
Tabel 21. Capaian Indikator Persentase Rencana Umum Pengadaan PPN Ternate Triwulan 1 Tahun 2026	36
Tabel 24. Capaian Indikator Nilai Survei kepuasan Masyarakat lingkup PPN Ternate Triwulan 1 Tahun 2026	44
Tabel 25 Alokasi Anggaran Kegiatan PPN Ternate Tahun 2026	46

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1. Struktur Organisasi PPN Ternate	3
Gambar 2. Dashboard Kinerja PPN Ternate Triwulan 1 Tahun 2026.....	8
Gambar 3. Dokumentasi Kegiatan yang Menunjang IKU Nilai PNBP Non SDA di PPN Ternate	15
Gambar 4. Dokumentasi Kegiatan yang Menunjang Produksi Perikanan Tangkap di PPN Ternate	18
Gambar 5. Dokumentasi Kegiatan yang Menunjang IKU Nilai Pengendalian Lingkungan di PPN Ternate	26
Gambar 6. Dokumentasi Kegiatan yang Menunjang IKU Kapal perikanan izin Daerah di PPN Ternate	29
Gambar 7. Dashboard Aplikasi Sidak.kkp.go.id Triwulan 1 Tahun 2026.....	32

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1. Nilai Kinerja Operasional PPN Ternate Triwulan 1 Tahun 2026.....	20
--	----

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Sebagaimana Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 08/Permen-KP/2012 tentang Kepelabuhanan Perikanan, Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate sebagai Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap mempunyai tugas fungsi pemerintahan dan fungsi pengusahaan. Untuk merealisasikan tugas dan fungsi tersebut, PPN Ternate melakukan berbagai kegiatan yang akan membantu dan mengawal tugas dan fungsi PPN Ternate sehingga target kinerja dapat tercapai. Agar pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut efektif, maka pelaksanaan kegiatan berpedoman pada visi dan misi Kementerian Kelautan dan Perikanan serta dokumen Penetapan Kinerja (PK) Tahun 2026.

Sebagai bentuk penyebaran informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan pada tahun 2026, maka disusunlah Laporan Kinerja. Laporan Kinerja ini juga merupakan amanat dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014. Melalui Laporan Kinerja diharapkan dapat menjadi informasi mengenai kinerja PPN Ternate sekaligus menjadi bahan masukan bagi peningkatan akuntabilitas kinerja pada masa yang akan datang. Peningkatan kinerja ini diperlukan agar PPN Ternate dapat lebih meningkatkan tugas dan fungsinya dalam rangka berperan memberikan pelayanan prima kepada masyarakat Kelautan dan Perikanan.

Acuan dalam penyusunan LKj PPN Ternate Tahun 2026 antara lain, yaitu:

- 1) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 2) Presiden No. 193 Tahun 2024 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- 3) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 66/PERMENKP/2020 Tahun 2020 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perikanan Tangkap;
- 4) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 5) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pedoman Umum Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian

Kelautan dan Perikanan;

- 6) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- 7) Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 205 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2024.
- 8) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2026 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan.

1.2. TUGAS DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 66/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perikanan Tangkap, dalam hal ini dipimpin oleh seorang Kepala Pelabuhan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Perikanan Tangkap yang mempunyai tugas melaksanakan pengolahan dan pelayanan pemanfaatan sumber daya ikan serta keselamatan operasional kapal perikanan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate menyelenggarakan fungsinya:

- 1) Penyusunan, pemantauan, dan evaluasi rencana, program, dan anggaran, serta pelaporan dibidang pelabuhan perikanan;
- 2) Pelaksanaan pengaturan keberangkatan, kedatangan dan keberadaan kapal perikanan di pelabuhan perikanan;
- 3) Pelaksanaan pelayanan penerbitan surat tanda bukti lapor kedatangan dan keberangkatan kapal perikanan;
- 4) Pelaksanaan pemeriksaan log book penangkapan ikan;
- 5) Pelaksanaan pelayanan penerbitan surat persetujuan berlayar;
- 6) Pelaksanaan penerbitan sertifikat hasil tangkapan ikan;
- 7) Pelaksanaan pengawasan pengisian bahan bakar;
- 8) Pelaksanaan pembangunan pengembangan pemeliharaan, pendayagunaan dan pengawasan serta pengendalian sarana dan prasarana
- 9) Pelaksanaan fasilitasi penyuluhan, pengawasan dan pengendalian sumber daya ikan, perkarantinaan ikan, publikasi hasil penelitian, pemantauan wilayah pesisir, wisata bahari, pembinaan mutu serta pengolahan, pemasaran dan distribusi hasil perikanan;
- 10) Pelayanan jasa, pemanfaatan lahan dan fasilitas usaha;

- 11) Pelaksanaan pengumpulan data, informasi dan publikasi;
- 12) Pelaksanaan bimbingan teknis dan penerbitan sertifikat cara penanganan ikan yang baik (cpib);
- 13) Pelaksanaan inspeksi pembongkaran ikan;
- 14) Pelaksanaan pengendalian lingkungan di pelabuhan perikanan;
- 15) Pelaksanaan urusan ketatausahaan dan rumah tangga.

1.3. STRUKTUR ORGANISASI

PPN Ternate merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bidang pelabuhan perikanan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Perikanan Tangkap. Organisasi dan Tata Kerja Pelabuhan Perikanan ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 66/Permen-KP/2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Perikanan serta Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 43 Tahun 2023 tentang Mekanisme Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi di Lingkungan kementerian Kelautan dan Perikanan untuk struktur penugasan pada UPT Eselon III sebagai berikut:



Gambar 1. Struktur Organisasi PPN Ternate

Dalam struktur Penugasan pada Gambar di atas, akan berlaku beberapa ketentuan yaitu sebagai berikut:

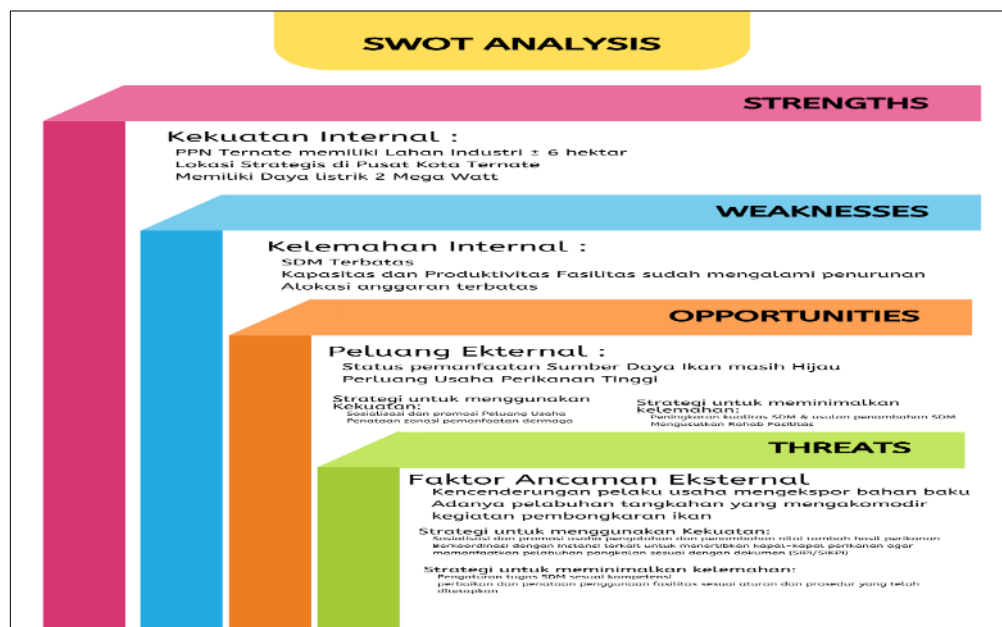
- a. Pejabat administrator menetapkan kinerja pejabat pengawas, Pejabat Fungsional, dan pelaksana;
- b. Pejabat administrator akan memberikan penilaian kinerja sekaligus memberikan Penugasan pada pejabat pengawas, Pejabat Fungsional, dan pelaksana; dan
- c. Pejabat administrator berperan selaku Pejabat Penilai Kinerja sekaligus Pimpinan Unit Organisasi.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Pejabat Administrator atau Kepala Pelabuhan membentuk 4 Tim Kerja sesuai dengan Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan pemanfaatan sumberdaya ikan serta keseluruhan operasional kapal perikanan dan pencapaian Indikator Kinerja Utama PPN Ternate, didukung oleh pegawai 47 ASN, 16 Tenaga Kontrak, serta Tenaga Outsourcing.

1.4. ISU STRATEGIS PPN TERNATE

Pelaksanaan operasional di PPN Ternate dalam mendukung program perikanan tangkap sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor lingkungan strategis yang dapat dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu lingkungan internal dan eksternal. Dengan demikian potensi dan permasalahan yang telah teridentifikasi dalam konteks lingkungan strategis internal maupun eksternal, untuk selanjutnya sekaligus dianalisis berbagai alternatif dasar arah kebijakannya. Metode SWOT akan digunakan sebagai dasar analisis agar proses telaah dapat dielaborasi ke dalam lingkungan strategis, sekaligus untuk mempermudah permusan alternatif arah kebijakan.



BAB II. PERENCANAAN KINERJA

2.1. RENCAN STRATEGIS

Mengacu pada tugas, fungsi dan wewenang yang telah dimandatkan dalam peraturan perundang-undangan kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan dan untuk melaksanakan Visi dan Misi sesuai dengan Program Asta Cita Presiden Republik Indonesia Periode 2024-2029 uraian sebagai berikut:

VISI KKP				
Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Mendukung Terwujudnya Visi Presiden dan Wakil Presiden, Yaitu: “Mewujudkan Sektor Kelautan dan Perikanan Indonesia yang Mandiri, Maju, Kuat dan Berbasis Kepentingan Nasional”				
MISI KKP				
Mengacu pada tugas, fungsi dan wewenang yang telah dimandatkan oleh peraturan perundang undangan kepada KKP dan penjabaran dari misi pembangunan nasional, maka terdapat 3 pilar yang menjadi misi KKP yakni:				
Kedaulatan (Sovereignty), yakni mewujudkan pembangunan kelautan dan perikanan yang berdaulat, guna menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumberdaya kelautan dan perikanan, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.		Keberlanjutan (Sustainability), yakni mewujudkan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan.		Kesejahteraan (Prosperity), yakni mewujudkan masyarakat kelautan dan perikanan yang sejahtera, maju, mandiri, serta berkepribadian dalam kebudayaan.
MISI DJPT				
Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia	Struktur Ekonomi Yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing	Mencapai Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan		Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya
SASARAN KEGIATAN PPN TERNATE				
Nilai PNBSP Sektor Perikanan Tangkap Meningkat di PPN Ternate	Produktivitas Perikanan Tangkap di PPN Ternate Meningkat	Pengelolaan PPN Ternate yang Optimal dan Bertanggung Jawab	Pengelolaan awak kapal perikanan, kapal perikanan dan alat penangkapan ikan berkelanjutan di PPN Ternate	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik di Lingkungan PPN Ternate
INDIKATOR KINERJA UTAMA				
IKU 1	IKU 2	KU 3, IKU 4, IKU 5, IKU 6, KU 7	IKU 8, IKU 9	IKM 10, IKM 11, IKM 12, IKM 13, IKM 14, IKM 15, IKM 16, IKM 17, IKM 18
PROGRAM, KEGIATAN DAN ANGGARAN				
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN DAN KELAUTAN				PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN

2.2. PERJANJIAN KINERJA

Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate telah menetapkan Perjanjian Kinerja tahun 2026 yang disepakati Bersama oleh Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate.

Pada perjanjian kinerja tersebut terdapat 5 (lima) Sasaran Kegiatan (SK) yang ingin dicapai. Untuk sasaran kegiatan yang disusun dan ditetapkan memiliki ukuran yang disebut sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU). Keseluruhan IKU PPN Ternate pada Tahun 2026 untuk semua SK berjumlah 18 (delapan belas) IKU. Sebagai alat ukur SK yang telah ditetapkan tahun 2026 sebagai berikut:

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET
Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan				
1.	Nilai PNBP Sektor Perikanan Tangkap Meningkat di Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate	1.	Penerimaan PNBP Non SDA di Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate (Rp. Juta)	2.369,031
2.	Produktivitas Perikanan Tangkap di Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate Meningkat	2.	Volume Produksi Perikanan Tangkap di Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate (Ton)	4.100
3.	Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate yang Optimal dan Bertanggung Jawab	3.	Persentase permohonan pengusahaan yang dianalisa dan/atau dievaluasi di Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate (Persen)	100
		4.	Tingkat Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate (Nilai)	88
		5.	Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate (persen)	60
		6.	Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate (persen)	82
		7.	Nilai Pengendalian Lingkungan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate (Nilai)	33
4.	Pengelolaan awak kapal perikanan, kapal perikanan dan alat penangkapan ikan berkelanjutan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate	8.	Kapal Perikanan izin daerah yang memenuhi ketentuan (kapal)	497
		9.	Tingkat Pemenuhan Persyaratan Bekerja Awak Kapal Perikanan (Nilai)	0,28

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET
5.	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik di Lingkungan Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate	10.	Nilai PM Pembangunan Zona integritas Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate yang Telah Dinilai WBK (Nilai)	75,50
		11.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate (Persen)	86
		12.	Nilai PM SAKIP Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate (Nilai)	88,20
		13.	Indeks Profesionalisme ASN di Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate (Indeks)	84,50
		14.	Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP di Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate	77
		15.	Persentase Pengelolaan BMN di Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate (Persen)	82
		16.	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate (Nilai)	92,10
		17.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate (Nilai)	71,75
		18.	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Lingkup Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate (Indeks)	88,80

Tabel 1. Perjanjian Kinerja PPN Ternate Tahun 2026

2.3. RENCANA KERJA

Dalam rangka mendukung visi dan misi serta pencapaian sasaran kegiatan, PPN Ternate didukung oleh anggaran kegiatan yang bersumber dari APBN tahun 2026, yang terbagi dalam 3 (tiga) kegiatan yaitu:

Tabel 2. Rencana Anggaran PPN Ternate Tahun 2026

KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
Pengelolaan Pelabuhan Perikanan	1.293.563.000
Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Perikanan Tangkap	11.798.025.000
Total Anggaran PPN Ternate Tahun 2026	13.091.588.000

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran capaian kinerja untuk setiap Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Manajerial (IKM) berpedoman pada Manual IKU agar tidak terjadi perbedaan pendapat dalam merencanakan, mengukur, mengevaluasi dan menganalisa indikator capaiannya. Pengukuran capaian kinerja tahun 2026 telah dilakukan berdasarkan hasil capaian data dukung yang diinput pada aplikasi kinerjaku.kkp.go.id untuk setiap indikator.

Dalam melakukan pengukuran capaian kinerja berdasarkan Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja yang telah disepakati dalam Perjanjian Kinerja di Triwulan 1 tahun 2026 yang terdiri dari 5 (lima) sasaran kegiatan dan 18 (delapan belas) Indikator Kinerja periode pengukuran ada yang diukur triwulan, semester dan tahunan dengan formula perhitungan yang berbeda disetiap indikator.

Pada Triwulan 1 2026, PPN Ternate mengukur capaian kinerja berdasarkan 5 (lima) sasaran kegiatan dan 11 (sebelas) indikator kinerja yang telah disesuaikan dengan periode pengukuran triwulan, dengan perolehan Nilai Capaian Organisasi (NKO) 110,10% atau kategori Istimewa sebagaimana dashboard Capaian Kinerja pada aplikasi [kinerjaku](http://kinerjaku.kkp.go.id) sebagai berikut:



Gambar 2. Dashboard Kinerja PPN Ternate Triwulan 1 Tahun 2026

Evaluasi dan analisis kinerja dilakukan dengan menggunakan formulir pengukuran kinerja sebagaimana Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan program sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi PPN Ternate. Berikut disajikan capaian setiap indikator kinerja yang telah dicapai pada Triwulan 1 tahun 2026.

Tabel 3. Capaian Kinerja PPN Ternate Triwulan 1 Tahun 2026

Kode	Sasaran/Indikator Kinerja	Satuan	Target 2026	Target TW1	Capaian TW 1	%
S.01	Nilai PNBPN Sektor Perikanan Tangkap Meningkat di Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate				96,28	
IK.01	Penerimaan PNBPN Non SDA di Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate (Rp. Juta)	Rp. Juta	2.369,03	592,26	570,24	96,28
S.02	Produktivitas Perikanan Tangkap di Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate Meningkat				66,16	
IK.02	Volume Produksi Perikanan Tangkap di Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate	Ton	4.100,00	1.025,00	678,09	66,16
S.03	Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate yang Optimal dan Bertanggung Jawab				109,7	
IK.03	Persentase permohonan pengusahaan yang dianalisa dan/atau dievaluasi di Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate	Persen	100	0		
IK.04	Tingkat Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate	Nilai	88	88	90,5	102,8
IK.05	Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate	Persen	60	0		
IK.06	Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate	Persen	82	0		
IK.07	Nilai Pengendalian Lingkungan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate	Nilai	33	33	84	120
S.04	Pengelolaan awak kapal perikanan, kapal perikanan dan alat penangkapan ikan berkelanjutan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate				99,53	
IK.08	Kapal Perikanan izin daerah yang memenuhi ketentuan	Kapal	497	422	420	99,53
IK.09	Tingkat Pemenuhan Persyaratan Bekerja Awak Kapal Perikanan	Nilai	0,28	0		
S.05	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik di Lingkungan Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate				113,88	
IK.10	Nilai PM Pembangunan Zona integritas Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate	Nilai	75,5	0		
IK.11	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate Data Dukung1 Data Dukung2	Persen	86	86	100	116,3
IK.12	Nilai PM SAKIP Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate	Nilai	88,2	0		
IK.13	Indeks Profesionalisme ASN di Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate	Indeks	84,5	0		

Kode	Sasaran/Indikator Kinerja	Satuan	Target 2026	Target TW1	Capaian TW 1	%
IK.14	Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP di Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate	Persen	77	77	100	120
IK.15	Persentase Pengelolaan BMN di Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate	Persen	82	0		
IK.16	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate	Nilai	92,1	0		
IK.17	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate	Nilai	71,75	0		
IK.18	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate	Nilai	88,8	88,8	93,56	105,4

Sumber data: <https://kinerjaku.kkp.go.id/> (akun kinerjaku PPN Ternate)

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa hanya ada 11 (sebelas) indikator kinerja yang memiliki target dan capaian Triwulan 1 karena pengukurannya secara triwulan dan semester sedangkan yang tidak memiliki target dan capaian triwulan merupakan indikator yang pengukurannya dilakukan tahunan. Namun berdasarkan tabel di atas dari 11(sebelas) indikator kinerja di Triwulan 1 2026, hanya 2 (dua) indikator yang tidak mencapai target triwulan, sedangkan 9 (sembilan) indikator telah melebihi capaian target triwulan. Untuk lebih jelas terkait Analisa Capaian Indikator kinerja Triwulan 1 2026 akan di bahas satu persatu sesuai dengan sasaran kegiatan masing-masing indikator kinerja.

3.2.1. Nilai PNBP Sektor Perikanan Tangkap Meningkat di Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate

Sasaran Kegiatan didukung oleh satu (1) Indikator Kinerja yaitu Penerimaan PNBP Non SDA di PPN Ternate.

IKU 1 PENERIMAAN PNBP NON SDA DI PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA TERNATE

Nilai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Sektor Kelautan dan Perikanan angka pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi penerimaan Pemerintah Pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara dari sektor kelautan dan perikanan.

Objek/Ruang Lingkup PNBPN: pemanfaatan non Sumber Daya Alam (SDA) diantaranya pelayanan, pengelolaan kekayaan negara dipisahkan, pengelolaan Barang Milik Negara (BMN), pengelolaan dana, pendapatan jasa layanan (BLU) dan hak negara lainnya (TGR dan denda tidak termasuk pelaksanaan tugas dan fungsi). Merupakan nilai PNBPN non SDA dari sektor PT di tahun berjalan sesuai PP Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBPN yang berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan

Formula perhitungan sebagai berikut :

Nilai TW I = capaian TW I; Nilai TW II = capaian TW I + TW II; Nilai TW III = capaian TW I + TW II + TW III; Nilai TW IV = capaian TW I + TW II + TW III + TW IV

Penerimaan PNBPN di PPN Ternate bersumber dari 2 (dua) penerimaan yaitu:

- 1) Penerimaan Umum, yaitu penerimaan yang bersumber dari penerimaan sewa rumah dinas;
- 2) Penerimaan Fungsional, yaitu penerimaan dari jasa pelayanan yang dilaksanakan di PPN Ternate sebagai berikut:
 - Jasa penggunaan tanah/bangunan (biaya pengembangan dan pemeliharaan);
 - Jasa penggunaan tangki BBM;
 - Jasa Tempat Penumpukan Barang;
 - Jasa penggunaan ruang pendingin (ABF/Cold Storage)
 - Jasa Pengadaan es;
 - Jasa pengadaan air;
 - Jasa tambat labuh;
 - Jasa pas masuk;
 - Jasa pekerjaan perbengkelan;
 - Jasa kebersihan/kebersihan kolam Pelabuhan;
 - Jasa Listrik;
 - Jasa penggunaan kendaraan.

Pada Triwulan 1 tahun 2026 diperoleh realisasi penerimaan PNBPN sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4. Jumlah Penerimaan PNBPD Berdasarkan Jenis Penerimaan di PPN Ternate Selama Bulan Januari-Maret 2026

No	Bulan	Jumlah (Rp. Juta)	Target (Rp. Juta)	%Capaian
1	Januari	Rp. 235,34	Rp. 592,26	
2	Februari	Rp. 189,14		
3	Maret	Rp. 145,76		
Capaian TW I		Rp. 570,24	Rp. 592,26	96,28%

Berdasarkan realiasi PNBPD Triwulan 1 tahun 2026, dilakukan pengukuran capaian IKU Penerimaan PNBPD Non SDA di PPN Ternate, Triwulan 1 tahun 2026 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 5. Capaian Indikator Penerimaan PNBPD Non SDA di PPN Ternate

Sasaran Kegiatan			Nilai PNBPD Sektor Perikanan Tangkap Meningkat di PPN Ternate				
Indikator Kinerja			Penerimaan PNBPD Non SDA di PPN Ternate (Rp. Juta)				
Capaian TW1 Tahun Sebelumnya			Triwulan 1 Tahun 2026			ANGGARAN (RP)	REALISASI (%)
2023	2024	2025	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN		
583.321	596.488	725,19	592,26	570,24	96,28	265.618.000	36,59%

1. Membandingkan Antara Target Dan Realisasi Kinerja Triwulan Berjalan

Berdasarkan tabel di atas, terlihat realisasi Triwulan 1 tahun 2026 mencapai 96,24% atau Rp 570,24 Juta dari target Rp 592,26 Juta, karena pengukuran capaian menggunakan metode pengukuran triwulan sehingga nilai realisasi melebihi dari target Triwulan 1 tahun 2026.

2. Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Triwulan Berjalan Dengan Triwulan Tahun Sebelumnya

Jika dibandingkan dengan realisasi kinerja Triwulan 1 dari tiga tahun terakhir, terlihat realisasi Triwulan 1 tahun 2026, mengalami penurunan sekitar 10% sedangkan jika dibandingkan dengan Triwulan 1 tahun 2023 dan 2024 maka realisasi Triwulan 1 tahun 2026 mengalami peningkatan yaitu 2023 ke 2024 atau naik sekitar 2.26% kenaikan ini tergolong stabil atau menggambarkan penerimaan yang konsisten namun tidak terlalu signifikan, sedangkan Triwulan 1 2024 ke 2026 realisasi melonjak dari 596.488 ke 725.190, dengan kenaikan

sekitar 21.58%. Ini menunjukkan adanya penerimaan yang cukup besar di Triwulan 1 2026.

3. Membandingkan Ralisasi Kinerja Dengan Triwulan Berjalan Dengan Target Tahunan

Jika dibandingkan dengan realiasi Triwulan 1 tahun 2026 dengan target tahun 2026 mencapai 76,52%, sehingga bila realisasi Nilai PNBP Non SDA di PPN Ternate dapat dipertahankan sepanjang tahun, maka realisasi dapat mencapai, bahkan melebihi target tahunan.

4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Jika dilakukan Analisa penyebab keberhasilan pencapaian IKU Nilai PNBP Non SDA di PPN Ternate yaitu adanya beberapa jenis penerimaan fungsional yang realisasi Triwulan 1 tahun 2026 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 6. Ringkasan Capaian PNBP Jenis Penerimaan Fungsional Triwulan 1 Tahun 2026

NO.	JENIS PELAYANAN	TOTAL PNBP 2026 (s.d TW 1)	TARGET (Rp.)	REALISASI (%)
1	Pas Masuk (Harian + Berlangganan)	287.235.000	1.009.325.000	28,46%
2	Penggunaan ABF dan Coldstorage	172.802.766	670.650.000	25,77%
3	Pemanfaatan Tanah dan/atau Bangunan (+ Pemeliharaan)	1.982.500	169.000.000	1,17%
4	Pengadaan Air	20.840.000	100.000.000	20,84%
5	Bengkel	27.730.000	120.680.000	22,98%
6	Pemakaian Listrik	17.420.917	98.475.000	17,69%
7	Tambat Labuh	9.619.803	65.150.000	14,77%
8	Penumpukan Barang	3.989.500	24.250.000	16,45%
9	Kebersihan (Kawasan + Kolam)	9.728.900	31.601.000	30,79%
10	Pengadaan Es	-	36.800.000	0,00%
11	Penggunaan Transportasi	1.850.000	20.700.000	8,94%
12	Tanki BBM	787.500	5.400.000	14,58%

Berdasarkan tabel diatas, diketahui pada periode Triwulan 1 2026 hanya 3 pelayanan yang mencapai target per pelayanan dikarenakan realisasi lebih dari 25%, diantaranya adalah pelayanan Pas Masuk, Penggunaan ABF/Coldstorage, dan Kebersihan (Kawasan dan Kolam Pelabuhan). Sedangkan 9 pelayanan lainnya masih belum mencapai target Triwulan 1 atau masih dibawah 25%, diantaranya pelayanan Pemanfaatan Tanah/Bangunan, Pengadaan Air, Bengkel, Pemakaian Listrik, Tambat Labuh, Penumpukan Barang, Pengadaan Es, Penggunaan Transportasi, dan Tanki BBM.

Pelayanan Pemanfaatan Tanah/Bangunan belum mencapai target dikarenakan umumnya PNBPN dari pelayanan ini bersifat tidak periodik sehingga hanya menerima PNBPN pada periode tertentu saja. Berdasarkan analisa, PNBPN dari pelayanan ini akan mencapai target pada periode Triwulan 2 hingga Triwulan 4 2026. Sedangkan PNBPN dari pengadaan es masih Rp. 0 dikarenakan adanya rencana untuk menggunakan mekanisme sewa oleh pihak ke-3 dan adanya efisiensi anggaran sehingga dari awal tahun 2026 pabrik es milik PPN Ternate tidak dioperasikan.

Pelayanan lainnya seperti Tambat Labuh masih belum mencapai target dikarenakan aktivitas kapal perikanan atau non perikanan yang masih belum meningkat di PPN Ternate hingga TW 1 sehingga PNBPN yang belum mencapai target. Sedangkan pelayanan penggunaan transportasi juga masih cukup rendah diakibatkan oleh masih minimnya penggunaan transportasi seperti Crane Truck, Forklift, Dumptruck oleh pelaku usaha di dalam PPN Ternate.

Pelayanan pengadaan air masih dibawah target 25% dikarenakan pelayanan ini mulai optimal di akhir bulan Januari 2026, dikarenakan adanya perbaikan pompa sumur bor sehingga PNBPN yang didapat masih dibawah target Triwulan 1.

5. Analisa Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Adapun program/kegiatan yang telah dilaksanakan di Triwulan 1 tahun 2026 antara lain:

- 1) Fasilitasi pelayanan yang dilaksanakan di PPN Ternate

- 2) Tindak Lanjut Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Triwulan sebelumnya
- 3) Koordinasi dengan instansi terkait dan stake holder terkait SOP Pelayanan dan peluang investasi usaha.



Gambar 3. Dokumentasi Kegiatan yang Menunjang IKU Nilai PNBP Non SDA di PPN Ternate

3.2.2. Produktivitas Perikanan Tangkap di Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate Meningkat

Sasaran kegiatan didukung oleh 1 (satu) Indikator Kinerja yaitu Volume Produksi Perikanan Tangkap di Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate.

IKU 2 VOLUME PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP DI PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA TERNATE

Indikator tersebut diukur berdasarkan hasil perhitungan jumlah pendaratan ikan yang masuk ke PPN Ternate baik melalui kapal penangkap maupun kapal penampung yang didaratkan di dermaga PPN Ternate serta jumlah ikan kiriman yang masuk ke PPN Ternate.

Volume produksi perikanan tangkap merupakan indikator yang menggunakan

pengukuran capaian triwulan dengan mengakumulasi jumlah volume produksi dari setiap bulan

Formula Perhitungan Sebagai Berikut:

$$\text{Capaian TW1} = \text{Produksi bulan 1} + \text{bulan2} + \text{bulan3}$$

$$\text{Capaian IKU} = \text{TW1} + \text{TW2} + \text{TW3} + \text{TW4}$$

Volume produksi perikanan tangkap di PPN Ternate selama Triwulan 1 2026 bersumber dari produksi pendaratan ikan dari kapal perikanan dan produksi ikan kiriman yang masuk ke PPN Ternate sebagaimana tabel berikut.

Tabel 7. Volume Produksi Perikanan Tangkap di PPN Ternate Bulan Januari – Maret 2026

No	Bulan	Jumlah (ton)	Target (ton)	% Capaian
1	Januari	252,50		
2	Februari	197,12		
3	Maret	228,47		
Capaian TW-1		678,09	1.025	66,15

Berdasarkan realisasi produksi perikanan tangkap yang didaratkan di PPN Ternate pada Triwulan 1 2026, dilakukan pengukuran Capaian indikator kinerja Volume Produksi Perikanan Tangkap di PPN Ternate sebagai berikut:

Tabel 8. Capaian Indikator Volume Produksi Perikanan Tangkap di PPN Ternate

Sasaran Kegiatan			Nilai PNPB Sektor Perikanan Tangkap Meningkat di PPN Ternate				
Indikator Kinerja			Volume Produksi Perikanan tangkap di PPN Ternate (Ton)				
Capaian TW1 Tahun Sebelumnya			Triwulan 1 Tahun 2026			ANGGARAN (RP)	REALISASI (%)
2023	2024	2025	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN		
886,09	913,84	1.056,48	1.025	678,09	66,16	13.605.000	60,32

- 1. Membandingkan Antara Target Dan Realisasi Kinerja Triwulan Berjalan**
Berdasarkan tabel di atas terlihat realisasi Triwulan 1 tahun 2026 mencapai 678,09Ton atau mencapai 66,16% dari target 1.025 Ton.
- 2. Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Triwulan Berjalan Dengan Triwulan Tahun Sebelumnya**

Jika dibandingkan dengan tiga tahun sebelumnya, terlihat realisasi Triwulan 1 tahun 2026 yang menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun, dengan rata-rata peningkatan sebesar 5% hingga 10%.

3. Membandingkan Realisasi Kinerja Dengan Triwulan Berjalan Dengan Target Tahunan

Jika dibandingkan dengan realisasi Triwulan 1 tahun 2026 sebesar 1.056,58 Ton dengan target tahun 2026 sebesar 4.100 Ton, maka realisasi capaian tahunan masih mencapai 46,45% dari target tahunan.

4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Faktor pendukung tercapainya realisasi Volume Produksi Perikanan di PPN Ternate adalah jumlah produksi ikan dari luar Ternate khususnya Maluku Utara ke PPN Ternate lebih tinggi dibandingkan jumlah produksi ikan yang didaratkan kapal di pelabuhan. Hal ini juga didukung dengan kelengkapan fasilitas Pemasaran Ikan dan distribusi ikan di PPN Ternate.

Faktor penghambatnya adalah produksi ikan dari luar Maluku Utara ke PPN Ternate mengalami penurunan. Selain itu, cuaca kurang kondusif seperti gelombang tinggi, angin kencang, dan curah hujan yang meningkat membatasi aktivitas penangkapan ikan di laut. Kondisi ini menyebabkan frekuensi melaut nelayan menurun sehingga berdampak langsung terhadap volume produksi yang dihasilkan. Selain itu perubahan pola migrasi ikan berpotensi menyebabkan hasil tangkapan menurun, meskipun upaya penangkapan tetap dilakukan. Aspek lainnya yaitu beberapa kapal mendaratkan ikan di pelabuhan pangkalan lainnya karena alasan penghematan biaya operasional dekat dengan fishing ground, ketersediaan umpan hidup dan kelancaran distribusi BBM.

5. Analisa Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Atau Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

1. Meningkatkan dukungan operasional kapal dibawah 5GT, seperti memfasilitasi ketersediaan BBM non subsidi untuk mendorong pendaratan ikan ke dermaga PPN Ternate.
2. Melakukan analisa terkait produksi ikan dari luar Maluku Utara ke PPN Ternate yang mengalami penurunan, sehingga dapat dicarikan solusi bagi para stakeholder dan



Gambar 4. Dokumentasi Kegiatan yang Menunjang Produksi Perikanan Tangkap di PPN Ternate

- Meningkatkan komunikasi dengan pelaku usaha/pengusaha untuk mendapatkan penyampaian data produksi secara real-time.

3.2.3. Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate yang Optimal dan Bertanggung Jawab

Sasaran kegiatan didukung oleh 5 (lima) Indikator Kinerja yaitu:

IKU 3 PERSENTASE PERMOHONAN PENGUSAHAAN YANG DIANALISA DAN/ATAU DIEVALUASI DI PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA TERNATE

Sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 8 Tahun 2012 Pelabuhan Perikanan mempunyai fungsi pemerintahan dan pengusaha. Fungsi pengusaha merupakan fungsi untuk melaksanakan pengusaha berupa penyediaan dan/atau pelayanan jasa kapal perikanan dan jasa terkait di pelabuhan perikanan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan tarif PNBP yang berlaku di Kementerian Kelautan dan Perikanan meliputi penerimaan dari pelabuhan perikanan diantaranya melalui sewa lahan/gedung/bangunan yang dalam prosesnya dibutuhkan analisa dan evaluasi terhadap permohonan penggunaannya.

Indikator capaian menggunakan pengukuran tahunan dengan formula perhitungan:

Indikator I :	$\frac{\text{Hasil Analisis Kesesuaian Permohonan Pengusaha terhadap usulan pengusaha baru/perpanjangan yang dianalisa dan/atau dievaluasi}}{\text{Total jumlah usulan pengusaha yang masuk di (nama satker)}} \times 80\%$
Indikator II :	Ruang lingkup pelayanan pengusaha yang terstandarisasi (SOP/ISO/Standar Pelaksanaan Lainnya) = 20 %
Persentase Pengusaha = Indikator I + Indikator 2	

Realisasi indikator persentase permohonan pengusaha yang dianalisa dan/atau dievaluasi di Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate belum dilakukan pengukuran karena merupakan indikator dengan target tahunan, sehingga pengukuran akan dilakukan pada triwulan ke empat.

IKU 4 TINGKAT KINERJA PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA TERNATE

Indikator kinerja ini merupakan penilaian kegiatan operasional Pelabuhan perikanan sesuai sesuai keputusan Dirjen No.20/2015 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Operasional Pelabuhan Perikanan yang ada pada aplikasi PIPP. Penilaian kinerja operasional PPN Ternate melalui aplikasi PIPP berdasarkan 27 kriteria penilaian antar yaitu 9 Parameter Administrasi dan Sistem Informasi, 6 parameter Fasilitas Pelabuhan Perikanan, 9 Parameter Pelayanan Publik dan 3 Parameter Investasi dan Industri.

Pengukuran capaian Tingkat Kinerja PPN Ternate dilaksanakan setiap triwulan dengan menggunakan formula:

Formula Perhitungan	$NK = \frac{\text{Bobot(A)} \times \text{Skala (S)}}{4}$	Keterangan : 1. Sangat baik jika NK = (86 - 100) 2. Baik jika NK = (66 - 85) 3. Sedang jika NK : (46- 65) 4. Kurang jika NK = (0 - 45)
1. Keterangan: Nilai TW I = capaian TW I; Nilai TW II = capaian TW II; Nilai TW III = capaian TW III; Nilai TW IV = capaian TW IV		

Nilai kinerja Operasional PPN Ternate selama Triwulan 1 tahun 2026 dapat dilihat pada grafik berikut:

No	Bulan	Nilai	Target	% Capaian
1	Januari	92,50		
2	Februari	90,25		
3	Maret	88,75		
Capaian TW-1		90,50	88	102,84

Grafik 1. Nilai Kinerja Operasional PPN Ternate Triwulan 1 Tahun 2026

Berdasarkan realisasi nilai kinerja operasional PPN Ternate pada Triwulan 1 2026, dilakukan pengukuran Capaian indikator kinerja Tingkat Kinerja PPN Ternate sebagai berikut:

Tabel 9. Capaian Indikator Tingkat Kinerja PPN Ternate

Sasaran Kegiatan			Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate yang Optimal dan bertanggung Jawab				
Indikator Kinerja			Tingkat Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate				
Capaian TW1 Tahun Sebelumnya			Triwulan 1 Tahun 2026			ANGGARAN (RP)	REALISASI (%)
2023	2024	2025	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN		
93,58	95,42	97,08	88	90.50		15.081.000	22,86

- Membandingkan Antara Target Dan Realisasi Kinerja Triwulan Berjalan**
Tingkat Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate pada triwulan 1 tahun 2026 mencapai 90,50 (Sangat Baik) atau 102,84 % dari target triwulan 1 tahun 2026. Realisasi capaian telah melebihi target triwulan 1 tahun 2025.
- Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Triwulan Berjalan Dengan Triwulan Tahun Sebelumnya**
Capaian kinerja Triwulan 1 tahun 2026 menunjukkan tren positif dan konsisten naik dari Triwulan 1 tahun 2022 hingga tahun 2024. Realisasi Triwulan 1 tahun 2026 berhasil melampaui target sebesar 10,08 poin dengan capaian 110,80 menandakan pengelolaan PPN Ternate semakin berjalan optimal dengan

peningkatan nilai kinerja organisasi yang menunjukkan peningkatan dari 3 tahun sebelumnya.

3. Membandingkan Ralisasi Kinerja Dengan Triwulan Berjalan Dengan Target Tahunan

Jika dibandingkan dengan target tahun 2026, maka realisasi nilai kinerja organisasi di Triwulan 1 tahun 2026 telah melampaui target tahunan, sehingga jika kinerja tetap konsisten dilaksanakan maka pada triwulan berikutnya tetap akan menunjukkann nilai yang optimal.

4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Faktor pendukung indikator kinerja pelabuhan perikanan dengan nilai Sangat Baik antara lain: efektifitas pelayanan Kesyahbandaran berbasis aplikasi online, perencanaan anggaran dan realisasi anggaran yang memenuhi target, kelengkapan fasilitas operasional pelabuhan, nilai survei sangat baik terhadap kualitas pelayanan dan tingkat pengendalian lingkungan pelabuhan perikanan yang sangat baik.

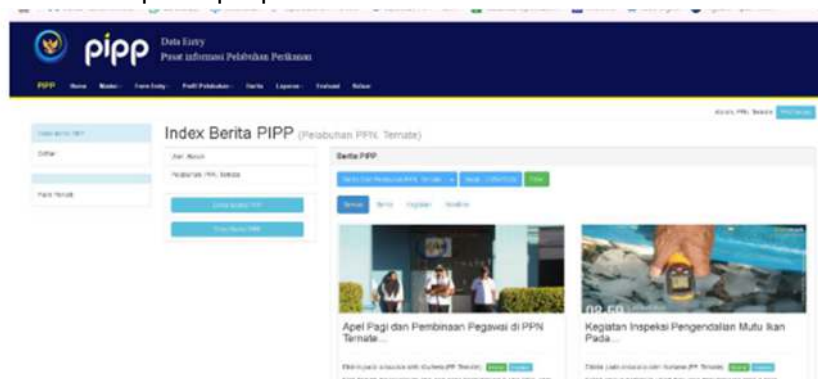
Faktor penghambat terdapat pada beberapa indikator, yaitu produksi perikanan tangkap belum mencapai target harian, frekuensi kunjungan kapal mendaratkan ikan yang belum optimal, penyerapan tenaga kerja belum maksimal, penyaluran BBM ke kapal masih

kurang dan penerbitan STBLKK untuk kapal skala kecil (<5 GT) belum terlaksana.

5. Analisa Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Adapun program/kegiatan yang telah dilaksanakan di Triwulan 1 tahun 2026:

Melakukan update pengumpulan dan penginputan data tenaga kerja baik itu semua pekerja yang beraktivitas di pelabuhan, administrasi kantor maupun pegawai instansi lainnya yang ada di Pelabuhan, mengoptimalkan pelayanan penerbitan STBLKK pada kapal-kapal skala kecil dibawah 5 GT, dan Memfasilitasi penyaluran BBM non subsidi ke kapal-kapal perikanan.



IKU 5 TINGKAT PELAYANAN KESYAHBANDRAAN PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA TERNATE

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 8 tahun 2012 dikatakan bahwa Pelabuhan Perikanan memiliki 2 fungsi yaitu fungsi pengusahaan dan fungsi pemerintahan, diantara fungsi pemerintahan adalah Pelabuhan perikanan melakukan pelayanan terhadap kapal perikanan yaitu pelayanan kesyahbandaran. Diantara pelayanan kesyahbandaran yaitu pelayanan Penerbitan Surat Tanda Bukti Laporan Kedatangan dan Keberangkatan Kapal Perikanan (STBLKK), Pelayanan Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) dan Pelayanan Penerbitan Sertifikasi Hasil Tangkapan Ikan (SHTI).

Indikator Kinerja Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran diukur dengan menggunakan formula:

FORMULA PERHITUNGAN = SPB + STBLK + SHTI

Bobot 40% SPB = (Jumlah SPB yang Diterbitkan/Jumlah Kapal yang beraktivitas) x 100

Bobot 40% STBLK = (Jumlah STBLK yang Diterbitkan/Jumlah Kapal yang beraktivitas) x 100

Bobot 20% SHTI = (Jumlah permintaan SHTI /Jumlah SHTI yang diterbitkan) x 100)

Realisasi indikator Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate belum dilakukan pengukuran karena merupakan indikator dengan target tahunan, sehingga pengukuran akan dilakukan pada triwulan ke empat.

IKU 6 PERSENTASE PENGENDALIAN PENGEMBANGAN FASILITAS PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA TERNATE

Sesuai dengan Permen KP Nomor 8 Tahun 2012, Pelabuhan perikanan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang digunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan. Dalam rangka menunjang fungsi pelabuhan perikanan, setiap pelabuhan perikanan memiliki fasilitas yang terdiri dari fasilitas pokok, fasilitas fungsional dan fasilitas penunjang. Pelabuhan perikanan yang telah beroperasi dapat dilakukan pengembangan sesuai dengan kebutuhannya.

Dalam rangka meningkatkan pelayanan di Pelabuhan Perikanan, PPN Ternate dituntut untuk memperhatikan sarana dan prasarana yang mendukung pelayanan kepada masyarakat perikanan, dengan jalan melakukan pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana fasilitas di PPN Ternate.

Adapun formula perhitungan yang digunakan dalam pengukuran realisasi indikator kinerja Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate sebagai berikut:

$$\text{Capaian IKU} = \frac{\text{Pengembangan Fasilitas PPN Ternate}}{\frac{\text{Master Plan PPN Ternate}}{100\%}} \times$$

Realisasi indikator Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate belum dilakukan pengukuran karena merupakan indikator dengan target tahunan, sehingga pengukuran akan dilakukan pada triwulan ke empat.

IKU 7 NILAI PENGENDALIAN LINGKUNGAN DI PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA TERNATE

Nilai pengendalian lingkungan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate yang merupakan indikator terkait tata Kelola lingkungan di Pelabuhan perikanan, merupakan indikator baru yang dimasukkan dalam PK Revisi. Indikator tersebut diukur berdasarkan hasil perhitungan nilai pada aplikasi SELARASKAN yang merupakan Sistem informasi berbasis Web yang berfungsi sebagai alat monitoring tata Kelola lingkungan di Pelabuhan perikanan yang berisikan program lingkungan hingga hasil pencapaian kualitas lingkungan yang diupdate berkala dan dicantumkan dalam bentuk score Pelabuhan.

- Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, persetujuan lingkungan melalui penyusunan amdal dan uji kelayakan amdal atau penyusunan formular UKL-UPL dan pemeriksaan UKL-UPL.
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kepelabuhanan Perikanan, penyelenggaraan Pelabuhan perikanan yang mengoperasikan Pelabuhan perikanan harus: 1) bertanggung jawab sepenuhnya atas pengoperasian pelabuhan perikanan yang bersangkutan; dan

2) menaati ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perikanan dan lingkungan.

- SELARASKAN merupakan sistem informasi berbasis WEB yang berfungsi sebagai alat monitoring tata kelola lingkungan di pelabuhan perikanan yang berisikan program lingkungan hingga hasil pencapaian kualitas lingkungan yang di update berkala dan dicantumkan dalam bentuk skore Pelabuhan.

Adapun formula perhitungan capaian iku sebagaimana formula berikut:

$$\text{Nilai Bulanan} = \text{Skor Indikator Program (60\%)} + \text{Skor Hasil (40\%)}$$

$$\text{Capaian IKU} = \frac{\text{Nilai TW4}(b1 + b2 + b3)}{3}$$

Tabel 10. Nilai Implementasi Selaraskan PPN Ternate yang telah dievaluasi Selama Bulan Januari-Maret 2026

No	Bulan	Nilai / Skor Koreksi	Target	% Capaian
1	Januari	80,75		
2	Februari	85,31		
3	Maret	85,94		
Capaian TW-1		84,00	33,00	254,54

Berdasarkan realiasi PNB Triwulan 1 tahun 2026, dilakukan pengukuran capaian IKU Nilai Pengendalian Lingkungan di PPN Ternate, Triwulan 1 tahun 2026 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 11. Capaian Indikator Nilai Pengendalian Lingkungan di PPN Ternate

Sasaran Kegiatan			Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate yang Optimal dan Bertanggung Jawab				
Indikator Kinerja			Nilai Pengendalian Lingkungan di PPN Ternate (Nilai)				
Capaian TW1 Tahun Sebelumnya			Triwulan 1 Tahun 2026			ANGGARAN (RP)	REALISASI (%)
2023	2024	2025	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN		
-	87,29	88,98	30,10	90,11	120	930469.000	27,82%

1. Membandingkan Antara Target Dan Realisasi Kinerja Triwulan Berjalan

Nilai Pengendalian Lingkungan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate pada triwulan 1 tahun 2026 adalah 84,00 atau 254,54 % dari target triwulan 1 tahun 2026. Realisasi sudah melebihi capaian target triwulan 1 tahun 2026.

2. Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Triwulan Berjalan Dengan Triwulan Tahun Sebelumnya

Indikator kinerja Nilai Pengendalian Lingkungan, merupakan indikator yang diukur sejak tahun 2024, sehingga hanya dapat dibandingkan dengan Triwulan 1 tahun 2024.

Berdasarkan data realisasi terjadi peningkatan capaian dari Triwulan 1 tahun 2026 sebesar 1,69 nilai Triwulan 1 2024. Walaupun peningkatan nilai tidak begitu signifikan, namun terdapat peningkatan dalam pengelolaan lingkungan di PPN Ternate.

3. Membandingkan Ralisasi Kinerja Dengan Triwulan Berjalan Dengan Target Tahunan

Jika realisasi Triwulan 1 tahun 2026 dibandingkan dengan target tahun 2026, maka realisasi telah melampaui target tahunan bahkan mencapai 299% dari target tahunan yang ditetapkan, sehingga bila realisasi tersebut dapat dipertahankan sepanjang tahun, maka dapat dipastikan realisasi dapat melebihi target tahunan.

4. Analisa Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Jika dianalisa penyebab keberhasilan antara lain di dukung oleh:

- Menugaskan operator Aplikasi Selaraskan untuk melakukan update data dukung sesuai kebutuhan di setiap bulan sebelum dilakukan verifikasi penilaian oleh Tim Verifikasi Selaraskan;
- PPN Ternate telah memperoleh Sertifikat ISO 14001 terkait lingkungan, sehingga di setiap aktivitas pengelolaan lingkungan PPN Ternate berupaya untuk melakukan penerapan dalam lingkungan kerja dan aktivitas pelayanan;
- Adanya efisiensi pemakaian listrik dan air setiap bulan dengan diberlakukannya sistem kerja *Work From Anywhere* (WFA) khusus di hari Jumat dengan hanya menugaskan petugas pelayanan yang wajib untuk berkerja dari kantor, sedangkan petugas administrasi dapat bekerja dari mana saja, sehingga sangat menekan efisiensi pemakaian Listrik dan air;

5. Analisa Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Adapun program/kegiatan yang telah dilaksanakan di Triwulan 1 tahun 2026 antara lain:

- 1) Pelaksanaan kebersihan area pelabuhan secara harian
- 2) Efisiensi pemakaian listrik dan air setiap bulan
- 3) Kegiatan rutin patroli energi dan air serta patroli keselamatan dan keamanan area dermaga



Gambar 5. Dokumentasi Kegiatan yang Menunjang IKU Nilai Pengendalian Lingkungan di PPN Ternate

3.2.4. Pengelolaan awak kapal perikanan, kapal perikanan dan alat penangkapan ikan berkelanjutan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate

IKU 8 KAPAL PERIKANAN IZIN DAERAH YANG MEMENUHI KETENTUAN

Berdasarkan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja bahwa kewenangan Penerbitan Sertifikasi Kelaikan dan Pengawakan Kapal Penangkap Ikan dilaksanakan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan. Indikator pengukuran capaian merupakan jumlah hasil Pemeriksaan Kapal Perikanan yang telah diterbitkan Sertifikat Kalaikan Kapal Perikanan (SKKP) yang diterbitkan di PPN Ternate.

Pengukuran capaian Kapal Perikanan Izin Daerah yang Memenuhi Ketentuan dihitung secara kumulatif dari penerbitan Dokumen SKKP setiap bulan. Capaian indikator Kapal Perikanan Izin Daerah yang Memenuhi Ketentuan menggunakan formula:

$$\text{Capaian IKU} = \text{SKKP b1} + \text{SKKP b2} + \dots \text{dst SKKP b12}$$

Keterangan:

Nilai TW I = capaian 2023 + 2024 + TW I;

Nilai TW II = capaian 2023 + 2024 + TW I + TW II;

Nilai TW III = capaian 2023 + 2024 + TW I + TW II + TW III;

Nilai TW IV = capaian 2023 + 2024 + TW I + TW II + TW III + TW IV

Tabel 12. Jumlah SKKP yang diterbitkan di PPN Sampai dengan Triwulan 1 2026

No	Bulan	Jumlah	Target	%Capaian
Capaian tahun 2025		397	397	
1	Januari	8	25	
2	Februari	8		
3	Maret	7		
Capaian TW 1 2026		420	422	99,52

Berdasarkan realiasi Penerbitan SKKP Triwulan 1 tahun 2026, dilakukan pengukuran capaian IKU Kapal Perikanan Izin Daerah yang Memenuhi Ketentuan, Triwulan 1 tahun 2026 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 13. Capaian Indikator Kapal Perikanan Izin Daerah yang Memenuhi Ketentuan

Sasaran Kegiatan			Pengelolaan awak kapal perikanan, kapal perikanan dan alat penangkapan ikan berkelanjutan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate				
Indikator Kinerja			Kapal Perikanan Izin Daerah yang Memenuhi Ketentuan (Kapal)				
Capaian TW1 Tahun Sebelumnya			Triwulan 1 Tahun 2026			ANGGARAN (RP)	REALISASI (%)
2023	2024	2025	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN		
-	158	292	422	420	99,52	-	-

- 1. Membandingkan Antara Target Dan Realisasi Kinerja Triwulan Berjalan**
 Berdasarkan tabel di atas, terlihat realisasi Triwulan 1 tahun 2026 tidak mencapai target dengan 99,52% atau 420 Kapal dari target 422 Kapal. Berdasarkan data realisasi Triwulan 1 tahun 2026 tidak mencapai target Triwulan 1 2026 yang ditetapkan.
- 2. Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Triwulan Berjalan Dengan Triwulan Tahun Sebelumnya**
 Berdasarkan data realisasi terjadi peningkatan capaian dari Triwulan 1 tahun 2024 dari 158 kapal mencapai 292 kapal yang diterbitkan SKKP pada Triwulan 1 tahun 2026. Peningkatan jumlah kapal tersebut dipengaruhi oleh adanya perhitungan akumulasi penerbitan SKKP dari tahun 2024 hingga Triwulan 1 tahun 2026, sehingga dipastikan adanya peningkatan dari Triwulan 1 tahun sebelumnya.
- 3. Membandingkan Ralisasi Kinerja Dengan Triwulan Berjalan Dengan Target Tahunan**

Jika realisasi Triwulan 1 tahun 2026 sebanyak 292 kapal, dibandingkan dengan target tahun 2026 sebanyak 368 kapal, maka realisasi masih sangat jauh dari target tahunan, sehingga diharapkan untuk dapat memfasilitasi seluruh permohonan penerbitan SKKP sehingga dapat mencapai target tahun 2026

4. Analisa Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Adapun faktor menghambat tercapainya target triwulan 1, karena permohonan pemeriksaan kelaikan kapal perikanan di triwulan 1 hanya sebanyak 23 kapal dan semua telah di terbitkan SKKP.

Jika melihat data permohonan pemeriksaan di triwulan 1 tahun 2025, masih ada beberapa kapal yang belum mengajukan perpanjangan, sehingga menghambat pencapaian realisasi.

Sedangkan Faktor yang mendukung realisasi penerbitan SKKP yaitu adanya 6 kapal perikanan yang mengajukan Penerbitan Baru Sertifikat SKKP.

5. Analisa Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Jika melihat berdasarkan program/kegiatan tahun anggaran 2026, tidak ada anggaran yang dialokasikan khusus untuk kegiatan pemeriksaan kelaikan kapal perikanan, namun setiap permohonan SKKP, PPN Ternate mengupayakan menugaskan Pegawai di Pelabuhan Binaan untuk melakukan pemeriksaan kelaikan kapal perikanan untuk menunjang penerbitan SKKP terutama di lokasi di luar PPN Ternate.



Gambar 6. Dokumentasi Kegiatan yang Menunjang IKU Kapal perikanan izin Daerah di PPN Ternate

IKU 9 TINGKAT PEMENUHAN PERSYARATAN BEKERJA AWAK KAPAL PERIKANAN

IKU Tingkat Pemenuhan Persyaratan Bekerja Awak Kapal Perikanan adalah indikator baru yang dimunculkan ditahun 2026. Merupakan indikator yang menunjukkan pemenuhan persyaratan bekerja awak kapal perikanan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33 Tahun 2021, serta Surat Edaran Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor B.2541/MEN-KP/XII/2024.

Tujuan implementasi indikator ini adalah untuk menjamin kepatuhan regulasi serta meningkatkan kesejahteraan dan keselamatan awak kapal perikanan.

Tingkat pemenuhan dibagi kedalam 4 kategori sebagai berikut:

Nilai $\leq 0,25$ kategori “Kurang”;

Nilai $> 0,25$ s.d. $< 0,50$ kategori “Cukup”;

Nilai $> 0,50$ s.d. $< 0,75$ kategori “Baik”;

Nilai $> 0,75$ s.d. $1,00$ kategori “Sangat Baik”;

Indikator ini mencerminkan seberapa besar tingkat pemenuhan standar kelayakan kerja bagi awak kapal perikanan di PPN Ternate.

Pengukuran capaian Tingkat Pemenuhan Persyaratan Bekerja Awak Kapal Perikanan diukur secara semester dengan menggunakan formula:

(1) Kepatuhan s.d. 5 GT	$= \frac{(e \times 0,25) + (f \times 0,50) + (g \times 0,75) + (h \times 1,00)}{\text{Jumlah SPB s.d. 5 GT}}$	Keterangan : (a) Cek list minimal persyaratan yang diajukan dalam persyaratan penerbitan SPB (b) Cek list minimal persyaratan yang diajukan dalam persyaratan penerbitan SPB (sesuai SE) (c) Cek list minimal persyaratan yang diajukan dalam persyaratan penerbitan SPB (Wajib lengkap 0.75 untuk kapal >100 Laut Lepas (d) Cek list minimal persyaratan yang diajukan dalam persyaratan penerbitan SPB (wajib 1,00 dilengkapi untuk kapal >300GT) (e) Jumlah SPB terbit dengan konsisi pemenuhan persyaratan bekerja (a) (f) Jumlah SPB terbit dengan konsisi pemenuhan persyaratan bekerja (b) (g) Jumlah SPB terbit dengan konsisi pemenuhan persyaratan bekerja (c) (h) Jumlah SPB terbit dengan konsisi pemenuhan persyaratan bekerja (d)
(2) Kepatuhan > 5 s.d. 30 GT	$= \frac{(e \times 0,25) + (f \times 0,50) + (g \times 0,75) + (h \times 1,00)}{\text{Jumlah SPB > 5 s.d. 30 GT}}$	
(3) Kepatuhan >30 s.d. 100 GT	$= \frac{(e \times 0,25) + (f \times 0,50) + (g \times 0,75) + (h \times 1,00)}{\text{Jumlah SPB >30 s.d. 100 GT}}$	
(4) Kepatuhan ≥ 100 GT	$= \frac{(e \times 0,25) + (f \times 0,50) + (g \times 0,75) + (h \times 1,00)}{\text{Jumlah SPB } \geq 100 \text{ GT}}$	
(5) Kepatuhan ≥ 100 GT Laut Lepas	$= \frac{(e \times 0,25) + (f \times 0,50) + (g \times 0,75) + (h \times 1,00)}{\text{Jumlah SPB } \geq 100 \text{ GT Laut Lepas}}$	
(6) Kepatuhan ≥ 300 GT	$= \frac{(e \times 0,25) + (f \times 0,50) + (g \times 0,75) + (h \times 1,00)}{\text{Jumlah SPB } \geq 300 \text{ GT}}$	
Total Nilai	$= \frac{(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)}{6 \text{ (sesuai range ukuran kapal yg ada di pelabuhan)}}$	
Jumlah SPB terbit dikalikan dengan koefisien kondisi pemenuhan persyaratan bekerja dibagi dengan jumlah SPB terbit sesuai dengan range GT kapal. Total nilai adalah jumlah nilai masing-masing kepatuhan di setiap range GT Kapal dibagi dengan jumlah kategori range GT Kapal yang terdapat di Pelabuhan.		

Stasus	Nilai	Batas Bawah	Kategori Pemenuhan Persyaratan	Batas Bawah	Stasus	TARGET 2026
Tingkat Kepatuhan 1	£0,25	0	Kurang	0	Tingkat Kepatuhan 1	
Tingkat Kepatuhan 2	>0,25 s.d. <0,50	0,26	Cukup	0,26	Tingkat Kepatuhan 2	0,26
Tingkat Kepatuhan 3	>0,50 s.d. <0,75	0,51	Baik	0,51	Tingkat Kepatuhan 3	
Tingkat Kepatuhan 4	>0,75 s.d. 1,00	0,76	Sangat Baik	0,76	Tingkat Kepatuhan 4	

Pengukuran capaian IKU Tingkat Pemenuhan Persyaratan Bekerja Awak Kapal Perikanan menggunakan pengukuran semester, sehingga capaian di twulan 1 tahun 2026 belum dapat diukur

3.2.5. Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik di Lingkungan Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate

IKU 10 NILAI PM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA TERNATE

Indikator kegiatan pada merupakan kegiatan pembangunan zona integritas yaitu predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Pengukuran indikator ini berupa pemenuhan dokumen yang diukur mandiri berdasarkan Lembar Kerja Evaluasi (LKE) yang dilakukan dengan menyesuaikan nilai capaian dengan ketersediaan dokumen-dokumen pembangunan zona integritas di PPN Ternate. Adapun pengukuran berdasarkan Lembar Kerja Evaluasi (LKE) sesuai dengan Lampiran III Peraturan Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2024 Tentang Pembangunan Dan Evaluasi Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah.

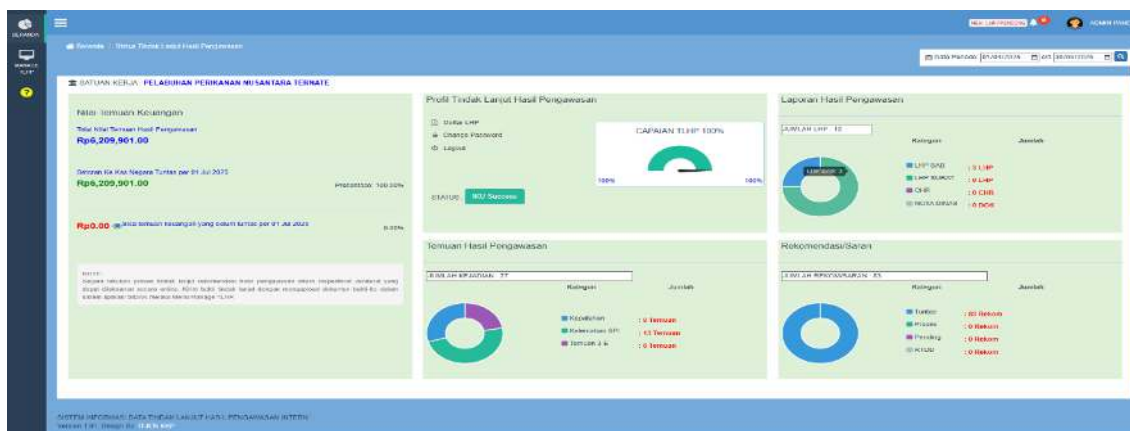
Indikator dilakukan pengukuran secara tahunan menggunakan Lembar Evaluasi sesuai berdasarkan Keputusan Inspektur Jenderal KKP Nomor 54 tahun 2024.

IKU 11 PERSENTASE REKOMENDASI HASIL PENGAWASAN YANG DIMANFAATKAN UNTUK PERBAIKAN KINERJA PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA TERNATE

Indikator Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate merupakan hasil penyelesaian terhadap temuan pengelolaan keuangan dan operasional PPN Ternate. Hasil penyelesaian dapat dilihat pada aplikasi sidak.kkp.go.id yang dikelola oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan. Formula pengukuran capaian indikator menggunakan rumus:

$$\text{Capaian IKU} = \frac{\text{Total Rekomendasi TW1 2026}}{\text{Total Rekomendasi ditindaklanjuti s.d TW4 2025}} \times 100\%$$

Data dukung pengukuran diperoleh dari dashboard aplikasi sidak.kkp.go.id sebagaimana disajikan pada gambar berikut:



Gambar 7. Dashboard Aplikasi Sidak.kkp.go.id Triwulan 1 Tahun 2026

Tabel 14. Perbandingan Capaian Indikator Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate Tahun 2026 dengan Tahun Sebelumnya.

Sasaran Kinerja 5		Terwujudnya layanan Dukungan Manajerial yang Baik di Lingkungan PPN Ternate				
Indikator Kinerja		Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate				
Capaian Tahun Sebelumnya		Triwulan 1 Tahun 2026			ANGGARAN (RP)	REALISASI (%)
TW 1 2024	TW1 2025	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN		
100	100	86	100	117,65	-	-

1) Membandingkan Target dan realisasi Kinerja Triwulan Berjalan

Berdasarkan realisasi bahwa rekomendasi sampai dengan Triwulan 1 tahun 2026 seluruhnya telah ditindak lanjuti sehingga terealisasi 100% atau mencapai 117,65% dari target tahun 2026.

2) Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta capaian Kinerja Triwulan Berjalan dengan Triwulan Tahun Sebelumnya

Nilai realisasi dengan tahun 2024 memiliki capaian yang sama yaitu 100% karena seluruh rekomendasi telah ditindak lanjuti.

3) Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai dengan Triwulan berjalan dengan Target Tahununan

Jika dibandingkan dengan target tahunan, maka ralisasi Triwulan 1 tahun 2026 telah melampaui target tahunan, namun nilai tersebut masih dapat berubah karena masih ada 6 (enam) bulan yang perlu dilalui sehingga membutuhkan pengawasan yang lebih lanjut jika ada rekomendasi di bulan berikutnya agar dapat mencapai target tahunan.

4) Analisa Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Salah satu pendukung tercapainya realisasi Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja merupakan salah satu indikator yang seluruh rekomendasinya telah ditindaklanjuti sehingga dapat mencapai realisasi 100%

5) Analisa Program/Kegiatan yang menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan

Kegiatan yang mendukung pencapaian yaitu dilakukannya tindak lanjut dari tim pengawasan ke aplikasi SIDAK

IKU 12 NILAI PM SAKIP PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA TERNATE

Indikator Nilai Penilaian Mandiri SAKIP merupakan penilaian mandiri yang dilakukan Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate dengan berdasarkan Lembar Kerja Evaluasi. Selaras dengan terbitnya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Kinerja Lingkup Kementarian Kelautan dan Perikanan dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2026 tentang organisasi dan tata kerja KKP, maka Ditjen

Perikanan Tangkap melakukan Penyesuaian pada Pedoman Evaluasi AKIP tahun 2026. Adapun pembobotan nilai evaluasi AKIP sebagaimana tabel berikut:

Tabel 15. Pembobotan Nilai Evaluasi AKIP

Komponen	Sub-komponen			Total Bobot
	Keberadaan (20%)	Kualitas (30%)	Pemanfaatan (50%)	
Perencanaan Kinerja	6	9	15	30
Pengukuran Kinerja	6	9	15	30
Pelaporan Kinerja	3	4,5	7,5	15
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	5	7,5	12,5	25
Nilai Akuntabilitas Kinerja	20	30	50	100

Indikator Nilai PM SAKIP di ukur secara tahunan sehingga untuk Triwulan 1 tahun 2026 belum ada realisasi.

IKU 13 INDEKS PROFESIONALISME ASN DI PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA TERNATE

Indeks profesionalitas ASN merupakan ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN yang berdasarkan kualifikasi pendidikan, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melakukan tugas jabatannya. Berdasarkan Permen PANRB Republik Indonesia Nomor 38 tahun 2018 tentang pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara, menggunakan 4 (empat) dimensi yaitu:

- Kualifikasi, diukur dari indikator riwayat pendidikan formal terakhir yang telah dicapai;
- Kompetensi, diukur dari indikator riwayat pengembangan kompetensi yang telah dilaksanakan;
- Kinerja, diukur dari indikator penilaian prestasi kerja PNS, dan
- Disiplin, diukur dari indikator riwayat penjatuhan hukuman disiplin yang pernah di alami.

Formula yang digunakan dalam melakukan pengukuran IP ASN berdasarkan hasil penginputan yang dilakukan pegawai berdasarkan 4 (empat) dimensi tersebut dalam aplikasi MyASN BKN, dan akan terintegrasi kedalam aplikasi ropeg.kkp.go.id diman nilai IP ASN Pegawai akan tergambar dalam aplikasi.

Tabel 16. Perbandingan Capaian IP ASN Tahun 2026 dengan Tahun Sebelumnya.

IKU 14 PERSENTASE RENCANA UMUM PENGADAAN PBJ YANG DIUMUMKAN PADA SIRUP DI PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA TERNATE

Rencana Umum Pengadaan (RUP) adalah instrumen penting dalam meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan pemerintah yang dilaksanakan melalui proses pengadaan barang/jasa. Melalui RUP, pemerintah mengumumkan secara terbuka pemaketan pengadaan yang akan dilaksanakan oleh KKP. Pengukuran terhadap persentase RUP yang diumumkan pada SiRUP dapat merepresentasikan kualitas perencanaan PBJ di (nama satker). Nilai pada indikator ini didapatkan dari persentase nilai pengadaan barang/jasa yang diumumkan dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) dibandingkan dengan nilai pagu pengadaan unit kerja mandiri. Pagu pengadaan merupakan pagu program dikurangi belanja pegawai dan pagu non pengadaan. Adapun ketentuan mengenai Persentase Rencana Umum Pengadaan dijabarkan pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Pasal 11 Ayat (1).

Pengukuran capaian secara triwulan dengan menggunakan Formula sebagai berikut:

$$\frac{\text{Nilai Rencana Umum PBJ yang diumumkan pada SIRUP}}{\text{Pagu Pengadaan Barang/Jasa}} \times 100\%$$

Pengukuran capaian IKU berdasarkan identifikasi belanja pengadaan yang dituangkan ke dalam penyusunan kertas kerja sebagai data dukung pembentuk nilai pagu pengadaan yang selanjutnya dilakukan proses reuiu RUP pada aplikasi SIRUP. Berikut disajikan rekapitulasi perhitungan acapai IKU Persentase Rencana Umum Pengadaan PPN Ternate pada Triwulan 1 tahun 2026

Tabel 17. Data Capaian IKU Persentase Rencana Umum Pengadaan PPN Ternate Triwulan 1 Tahun 2026

Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap		1.878.393.945.000	1.878.372.109.000	1.878.372.109.000	3.011.491.000	99,87%
1	517511 PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA NISAM ZACHMAN	15.972.735.000	15.972.735.000	15.972.735.000	-	100,00%
2	238723 SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP	219.562.391.000	219.562.391.000	219.562.391.000	-	100,00%
3	500293 PELABUHAN PERIKANAN NISANTARA PELABUHAN RATU	3.085.897.000	3.085.897.000	3.085.897.000	-	100,00%
4	602482 PELABUHAN PERIKANAN NISANTARA KEJOMBANGAN	425.112.873.000	425.112.873.000	425.112.873.000	-	100,00%
5	518117 PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA CILACAP	3.940.894.000	3.940.894.000	3.940.894.000	-	100,00%
6	238758 BALAI BESAR PENKANGKARAN WAM SEMARANG	4.940.394.000	4.940.394.000	4.940.394.000	-	100,00%
7	238711 PELABUHAN PERIKANAN NISANTARA PEKALONGAN	1.902.347.000	1.902.347.000	1.902.347.000	-	100,00%
8	407879 PELABUHAN PERIKANAN NISANTARA PRIGI	2.003.286.000	2.003.286.000	2.003.286.000	-	100,00%
9	407882 PELABUHAN PERIKANAN NISANTARA BRONDONG	3.195.346.000	3.195.346.000	3.195.346.000	-	100,00%
10	407888 PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA BELAKANG	8.498.000.000	8.498.000.000	8.498.000.000	-	100,00%
11	500401 PELABUHAN PERIKANAN NISANTARA SIBOLGA	2.877.488.000	2.877.488.000	2.877.488.000	-	100,00%
12	511488 PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA BUNDUS	3.011.491.000	3.011.491.000	-	3.011.491.000	99,9%
13	238801 PELABUHAN PERIKANAN NISANTARA PEMANGKAT	2.200.792.000	2.200.792.000	2.200.792.000	-	100,00%
14	238715 PELABUHAN PERIKANAN TANJUN TELUK BATANG	2.089.481.000	2.089.481.000	2.089.481.000	-	100,00%
15	602507 PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA BITUNG	60.313.949.000	60.313.949.000	60.313.949.000	-	100,00%
16	517695 PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA KENDARI	36.040.779.000	36.040.779.000	36.040.779.000	-	100,00%
17	602475 PELABUHAN PERIKANAN NISANTARA TUAL	1.959.181.000	1.959.181.000	1.959.181.000	-	100,00%
18	602481 PELABUHAN PERIKANAN NISANTARA AMBON	3.708.089.000	3.708.089.000	3.708.089.000	-	100,00%
19	603893 PELABUHAN PERIKANAN NISANTARA PENGAMBANGAN	1.198.531.231.000	1.198.531.231.000	1.198.531.231.000	-	100,00%
20	407887 PELABUHAN PERIKANAN NISANTARA TERNATE	2.808.316.000	2.808.316.000	2.808.316.000	-	100,00%
21	238746 PELABUHAN PERIKANAN NISANTARA KARANGKATU	3.785.871.000	3.785.871.000	3.785.871.000	-	100,00%
22	238211 PELABUHAN PERIKANAN NISANTARA TANJUNG PANGRAH	1.874.832.000	1.874.832.000	1.874.832.000	-	100,00%
23	238214 PELABUHAN PERIKANAN NISANTARA SUNGAILIT	1.215.163.000	1.215.163.000	1.215.163.000	-	100,00%
24	310719 PELABUHAN PERIKANAN NISANTARA KIRIANGANG	2.884.888.000	2.884.888.000	2.884.888.000	-	100,00%

Berdasarkan realiasi sebagaimana tabel di atas dilakukan pengukuran realiasi Triwulan 1 tahun 2026 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 18. Capaian Indikator Persentase Rencana Umum Pengadaan PPN Ternate Triwulan 1 Tahun 2026

Sasaran Kegiatan			Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik di Lingkungan Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate				
Indikator Kinerja			Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP di PPN Ternate				
Capaian TW1 Tahun Sebelumnya			Triwulan 1 Tahun 2026			ANGGARAN (RP)	REALISASI (%)
2023	2024	2025	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN		
-	-	100	77	100	120	-	-

- Membandingkan Antara Target Dan Realisasi Kinerja Triwulan Berjalan**
Berdasarkan tabel di atas, terlihat realisasi Triwulan 1 tahun 2026 mencapai 120% atau 100 dari target 77
- Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Triwulan Berjalan Dengan Triwulan Tahun Sebelumnya**
Nilai realisasi tidak dapat dibandingkan dengan triwulan tahun sebelumnya karena merupakan IKU baru di tahun 2026.
- Membandingkan Ralisasi Kinerja Dengan Triwulan Berjalan Dengan Target Tahunan**

Jika dibandingkan dengan target tahunan, maka realisasi Triwulan 1 telah melampaui target tahunan.

4. Analisa Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Realisasi capaian IKU didukung oleh penyesuaian Pagu pada aplikasi SIRUP dari hasil Revisi DIPA, penyesuaian ini dapat konsisten dilakukan karena di PPN Ternate terdapat 1 (satu) fungsional PBJ Muda yang penempatan tugasnya di PPN Ternate, sehingga memudahkan pemantauan oleh Pejabat Pembuat Komitmen.

5. Analisa Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Atau Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Capaian kinerja ini didukung oleh beberapa program/ kegiatan antara lain :

- Melakukan revisi halaman III DIPA serta revisi POK;
- Koordinasi yang intensif dengan Eselon I DJPT serta koordinasi dengan Kanwil DJPB Maluku Utara.

IKU 15 PERSENTASE PENGELOLAAN BMN DI PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA TERNATE

Kepatuhan BMN adalah kegiatan memastikan pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ini mencakup seluruh siklus pengelolaan BMN, mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, hingga pengamanan dan penghapusan aset tersebut, bertujuan agar pengelolaan BMN tertib, akuntabel, dan tidak menimbulkan kerugian negara.

Kepatuhan BMN meliputi beberapa tahapan pengelolaan aset negara:

1. Pengadaan: Memastikan BMN diadakan sesuai kebutuhan dan ketentuan.
2. Penggunaan dan Pemanfaatan: Penggunaan BMN yang harus sesuai dengan tugas dan fungsi instansi, serta upaya optimalisasi aset melalui pemanfaatan seperti sewa atau pinjam pakai.
3. Pengamanan: Melakukan tindakan fisik, administratif, dan hukum untuk menjaga aset tetap terpelihara dan terlindungi dari penyalahgunaan.
4. Pemeliharaan: Merawat BMN agar tetap dalam kondisi baik dan dapat dimanfaatkan secara optimal.
5. Penatausahaan: Melakukan pencatatan dan administrasi yang tertib terhadap seluruh BMN.

6. Penghapusan dan Pemindahtanganan: Menghapus BMN yang sudah tidak memiliki nilai manfaat, atau melakukan pemindahtanganan (seperti penjualan, hibah) jika BMN tidak lagi digunakan atau tidak memberikan manfaat optimal.

Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN di PPN Ternate diukur berdasarkan jumlah nilai dari beberapa unsur:

- Tingkat pemanfaatan Rencana Kebutuhan BMN (RKBMN) (bobot 12,5%);
- Tersedianya usulan penetapan status penggunaan BMN untuk pengadaan belanja modal yang sudah BAST (bobot 25%);
- Tersedianya usulan penghapusan BMN untuk BMN dengan kondisi Rusak Berat baik ke pengguna barang dan pengelola barang (bobot 25%);
- Penggunaan BMN hasil pengadaan belanja modal yang di dukung Berita Acara Serah Terima (BAST)/Berita Acara Pemakaian (bobot 25%);
- Penyusunan/Penyampaian Laporan BMN (Semesteran dan Tahunan) secara tepat waktu (bobot 12,5%).

Pengukuran IKU Persentase Pengelolaan Bmn Di Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate secara tahunan, sehingga belum ada realisasi pada Triwulan 1 tahun 2026.

IKU 16 NILAI INDIKATOR KINERJA PELAKSANAAN ANGGARAN (IKPA) PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA TERNATE

IKPA adalah Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran, sebuah alat ukur yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur dan mengevaluasi kualitas kinerja pelaksanaan anggaran oleh Kementerian Negara/Lembaga di Indonesia. IKPA mengukur tiga aspek utama: kualitas perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran. Tujuannya adalah memastikan anggaran negara digunakan secara efisien, efektif, dan akuntabel, serta mendorong satuan kerja untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan negara.

Aspek yang Diukur dalam IKPA

IKPA menilai kualitas pelaksanaan anggaran dari tiga sisi:

1. Kualitas Perencanaan Anggaran (20%):

Menilai kesesuaian antara pelaksanaan anggaran dengan rencana yang tertuang dalam DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran).

2. Kualitas Pelaksanaan Anggaran (55%):

Menilai kemampuan Satuan Kerja (Satker) dalam merealisasikan anggaran yang telah ditetapkan, termasuk penyerapan anggaran, pengelolaan Uang Persediaan (UP) dan Tambahan Uang Persediaan (TUP), serta penyerahan data kontrak secara tepat waktu.

3. Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran (25%):

Menilai pencapaian output (hasil) dan penyelesaian pelaksanaan pembayaran yang sesuai dengan target pembangunan.

Fungsi IKPA

- **Alat Monitoring dan Evaluasi:**

Untuk memantau kinerja pelaksanaan anggaran oleh setiap satker secara berkelanjutan.

- **Pengukuran Kualitas:**

Mengukur efisiensi, efektivitas, dan kepatuhan terhadap regulasi dalam penggunaan anggaran.

- **Pendorong Peningkatan Kinerja:**

Mendorong satker untuk meningkatkan kualitas pengelolaan anggarannya agar mencapai nilai IKPA yang baik.

- **Dasar Reward dan Punishment:**

Memberikan umpan balik, yang dapat menjadi dasar untuk memberikan penghargaan (reward) atau sanksi (punishment).

- **Alat Kontrol:**

Sebagai alat kontrol dalam pengawasan pengelolaan kinerja keuangan satuan kerja.

Elemen yang Memengaruhi Nilai IKPA

Nilai IKPA dipengaruhi oleh beberapa elemen pengelolaan kinerja keuangan, seperti: Jumlah revisi DIPA, Penyampaian dan deviasi data kontrak, Pengelolaan Uang Persediaan (UP) dan TUP, Kepatuhan penyampaian laporan data kontrak secara tepat waktu.

IKPA adalah indikator yang penetapannya oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi. IKPA digunakan sebagai alat monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran yang disediakan oleh Ditjen Perbendaharaan yang

terintegrasi pada Online Monitoring (OM) SPAN yang dijadikan ukuran dan mencerminkan kinerja satuan kerja atas kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan anggaran, kepatuhan terhadap regulasi, efektifitas pelaksanaan kegiatan serta efisiensi pelaksanaan anggaran.

Formula pengukuran berdasarkan: Peraturan DJPB per-4/PB/2021 tentang petunjuk teknis penilaian IKPA belanja K/L Menggunakan PMK No.195/PMK 05 2018 tentang monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran belanja K/L, dengan bobot penilaian sebagai berikut: 1) Penyerapan Anggaran; 2) Data Kontrak; 3) Penyelesaian Tagihan; 4) Konfirmasi Capaian Output; 5) Pengelolaan UP dan TUP ; 6) Revisi DIPA; 7) Deviasi Hal.3 DIPA; 8) LPJ Bendahara; 9) Renkas; 10) Kesalahan SPM; 11) Retur SP2D; 12) Pagu Minus ; 13) Dispensasi.

Pengukuran realisasi IKU Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (Ikpa) Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate secara semester, sehingga capaian Triwulan 1 belum ada.

IKU 17 NILAI KINERJA PERENCANAAN ANGGARAN (NKPA) PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA TERNATE

Evaluasi Kinerja Anggaran merupakan rangkaian proses yang mencakup pengukuran, penilaian, dan analisis kinerja anggaran untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan kinerja anggaran. Kinerja anggaran dapat berupa capaian output kegiatan dan capaian/realisasi anggaran. Makna anggaran di sini mengacu pada alokasi anggaran yang diterima oleh Kementerian/Lembaga (K/L). Aktivitas pada proses evaluasi (kinerja anggaran) mencakup pengukuran, penilaian, dan analisis kinerja. Pengukuran kinerja melibatkan aspek efisiensi. Efisiensi diukur dengan sebuah formula yang telah ditetapkan.

Aplikasi SMART adalah aplikasi berbasis web yang dibangun guna memudahkan satuan kerja dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran. Aplikasi ini dibangun oleh Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan RI sebagai alat pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran atas pelaksanaan rencana kerja dan anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian

Negara/Lembaga, evaluasi kinerja anggaran terdiri atas Evaluasi Kinerja Anggaran Reguler dan Evaluasi Kinerja Anggaran Non-Reguler. Evaluasi Kinerja Anggaran Reguler dilaksanakan secara berkala paling sedikit dua kali dalam satu tahun, satu kali untuk tahun anggaran berjalan dan satu kali untuk tahun anggaran sebelumnya. Evaluasi Kinerja Anggaran Reguler terdiri atas:

1). Evaluasi Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi Evaluasi ini dilaksanakan untuk Kinerja Anggaran tingkat unit eselon I dan tingkat satuan kerja dengan mengukur variabel-variabel sebagai berikut:

- a. Capaian output Variabel ini terdiri atas Capaian Output Program untuk Evaluasi Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi tingkat unit eselon I dan capaian RO untuk Evaluasi Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi tingkat satuan kerja. Variabel ini diukur dengan membandingkan antara realisasi dengan target Indikator Output Program dan Capaian RO. Bobot variabel ini pada aspek implementasi adalah sebesar 43,5 persen.
- b. Penyerapan anggaran Variabel ini diukur dengan membandingkan antara realisasi anggaran dengan pagu dalam DIPA terakhir. Bobot variabel ini pada aspek implementasi adalah sebesar 28,6 persen.
- c. Efisiensi Variabel ini terdiri atas efisiensi Output Program untuk Evaluasi Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi tingkat unit eselon I dan efisiensi RO untuk Evaluasi Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi Tingkat satuan kerja. Efisiensi dilakukan dengan membandingkan selisih antara pengeluaran seharusnya dan realisasi anggaran dengan alokasi anggaran. Pengeluaran seharusnya merupakan jumlah anggaran yang dibutuhkan untuk menghasilkan tingkat capaian Output Program atau capaian RO yang telah tercapai berdasarkan alokasi per target yang direncanakan. Sedangkan, realisasi anggaran merupakan jumlah anggaran yang terealisasi untuk menghasilkan capaian Output Program atau capaian RO. Bobot variabel ini pada aspek implementasi adalah sebesar 18,2 persen.
- d. Konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan Variabel ini dilakukan dengan memperhitungkan deviasi antara realisasi anggaran dengan Rencana Penarikan Dana (RPD) setiap bulan. Bobot variabel ini pada aspek implementasi adalah sebesar 9,7 persen.

2). Evaluasi Kinerja Anggaran atas Aspek Manfaat Evaluasi ini dilaksanakan untuk Kinerja Anggaran tingkat Kementerian/Lembaga dan tingkat unit eselon I dengan mengukur variabel-variabel sebagai berikut:

- a. Capaian Sasaran Strategis Kementerian/Lembaga untuk Kinerja Anggaran tingkat Kementerian/Lembaga; dan
- b. Capaian Sasaran Program untuk Kinerja Anggaran tingkat unit eselon I.

3). Evaluasi Kinerja Anggaran atas Aspek Konteks

Evaluasi ini dilaksanakan untuk Kinerja Anggaran tingkat Kementerian/Lembaga dan tingkat unit eselon I dengan menganalisis kualitas informasi Kinerja Anggaran yang tercantum dalam dokumen RKA-K/L dan/atau DIPA, termasuk relevansinya dengan dinamika perkembangan keadaan termasuk perubahan kebijakan pemerintah.

Evaluasi Kinerja Anggaran Non-Reguler dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan. Menteri Keuangan melaksanakan Evaluasi Kinerja Anggaran Non-Reguler untuk tahun anggaran berjalan dan/atau tahun anggaran sebelumnya. Evaluasi ini dilaksanakan untuk menghasilkan informasi sebagai bahan pertimbangan penyusunan kebijakan, terutama kebijakan di bidang penganggaran. Data dan hasil Evaluasi Kinerja Anggaran Reguler dapat digunakan untuk mendukung pelaksanaan Evaluasi Kinerja Anggaran Non-Reguler.

Formula pengukuran NKPA :

NKPA (Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran) didapatkan dengan menjumlahkan hasil perkalian Capaian RO, Penggunaan SBK, dan Efisiensi dengan sesuai bobot masing-masing indikator sebagai berikut:

Variabel	Uraian	Bobot
Efektivitas (75)	1. Capaian RO	75
	1. Penggunaan SBK	10
Efisiensi (25)	2. Efisiensi SBK	15

Capaian diukur tahunan sehingga pada Triwulan 1 tah 2026 belum ada realisasi.

IKU 18 NILAI SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT LINGKUP PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA TERNATE

Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) adalah data informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya.

Tujuan pelaksanaan SKM adalah untuk mengetahui gambaran kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat, terhadap mutu dan kualitas pelayanan yang telah diberikan oleh PPN Ternate berdasarkan 9 unsur pelayanan sesuai dengan Peraturan Menteri PAN RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Formula pengukuran berdasarkan Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)/ diukur dengan melihat hasil perhitungan 9 unsur pelayanan yang didapatkan dari seluruh unit penyelenggara pelayanan lingkup Ditjen Perikanan Tangkap (U1 Persyaratan Layanan, U2 Kemudahan Prosedur), U3 Waktu Penyelesaian, U4 Kesesuaian Biaya, U5, Kesesuaian Produk, U6 Kecepatan Respon, U7 Kemudahan Fitur/Kemampuan Petugas, U8 Kualitas Isi/Sarana, U9 Layanan Konsultasi). Hasil perhitungan diperoleh dari aplikasi SISUSAN KKP, yaitu aplikasi yang dikembangkan oleh PUSDATIN KKP sebagai tindak lanjut pengisian SKM di lingkup KKP.

Berikut hasil pengukuran SKM Triwulan 1 Tahun 2026 lingkup Dirjen Perikanan tangkap;

Unit Pelayanan Publik	Jumlah Responden	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9	Hasil SKM
PPN Sengaja	443	3,516	3,401	3,804	3,401	3,807	3,808	3,807	3,806	3,808	97,98
PPN Sengajik	179	3,632	3,849	3,816	3,782	3,810	3,728	3,743	3,754	3,782	94,68
PPN Tanjung Pandan	52	3,042	3,865	3,788	3,904	3,846	3,827	3,855	3,846	3,808	96,42
PPN Ternate	129	3,760	3,838	3,788	3,718	3,729	3,738	3,791	3,744	3,744	93,96
PPN Tual	42	3,786	3,819	3,819	3,595	3,867	3,595	3,867	3,824	3,548	90,64
PPN Teluk Batang	46	3,764	3,783	3,784	3,804	3,876	3,783	3,804	3,870	3,826	98,17
PPS Belawan	123	3,650	3,634	3,634	3,667	3,602	3,626	3,634	3,626	3,553	90,63
PPS Bitung	313	3,757	3,728	3,700	3,693	3,719	3,684	3,706	3,684	3,677	92,63
PPS Bungus	133	3,917	3,639	3,917	3,647	3,902	3,632	3,902	3,677	3,887	94,78
PPS Cilacap	111	3,901	3,901	3,847	3,874	3,838	3,838	3,874	3,856	3,883	96,70
PPS Kendari	63	3,857	3,841	3,841	3,825	3,841	3,762	3,825	3,794	3,794	95,50
PPS Nizam Zachman	215	3,698	3,670	3,656	3,600	3,637	3,595	3,660	3,633	3,595	90,96
DJPT	4088	3,781	3,767	3,747	3,749	3,745	3,717	3,758	3,717	3,705	93,57

Tabel 19. Capaian Indikator Nilai Survei kepuasan Masyarakat lingkup PPN Ternate Triwulan 1 Tahun 2026

Sasaran Kegiatan			Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik di Lingkungan Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate				
Indikator Kinerja			Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) PPN Ternate				
Capaian TW2 Tahun Sebelumnya			Triwulan 1 Tahun 2026			ANGGARAN (RP)	REALISASI (%)
2023	2024	2025	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN		
-	88,47	91,49	88,80	93,56	104,07	-	-

- Membandingkan Antara Target Dan Realisasi Kinerja Triwulan Berjalan**
 Jika dibandingkan dengan target Triwulan 1 tahun 2026, realisasi telah melebihi dari target yang ditetapkan yaitu sebesar 104,51%
- Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Triwulan Berjalan Dengan Triwulan Tahun Sebelumnya**
 Nilai realisasi hanya dibandingkan dengan Triwulan 1 tahun 2024 dimana nilai realisasi Triwulan 1 tahun 2026 lebih tinggi 3,63 point.
- Membandingkan Ralisasi Kinerja Dengan Triwulan Berjalan Dnegan Target Tahunan**
 Jika dibandingkan denga target tahun 2026, maka realisasi Triwulan 1 tahun 2026 telah melampaui target tahunan, namun nilai tersebut masih dapat berubah sesuai dengan survei yang akan dilakukan di triwulan berikutnya.
- Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atai Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan**
 Salah satu yang mendukung realisasi Adalah pelayan pengadaan air yang memperoleh nilai terbesar 92,10 walaupun masih ada nilai SKM pelayanan unit pendingin yang memperoleh nilai cukup kecil yaitu 68,06 sehingga perlu

dilakukan sosialisasi dan evaluasi pelayanan untuk meningkatkan nilai SKM di triwulan berikutnya.

5. Analisa Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Kegiatan yang telah dilaksanakan untuk mendukung keberhasilan yaitu:

- Melakukan sosialisasi kepada Masyarakat terkait jenis-jenis pelayanan dan tata cara pengisian survei sesuai dengan pelayanan yang telah diterima;
- Melakukan pengisian link survey sesaat setelah menerima pelayanan dengan memberdayakan petugas keamanan di ruang pelayanan 1 (satu) atap.



3.2. REALISASI ANGGARAN

Pada tahun 2026 Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate mendapatkan alokasi anggaran APBN sebesar Rp. 12.655.135.000,-,- yang akan digunakan untuk kegiatan operasional PPN Ternate serta membiayai kegiatan program Pengelolaan Perikanan Tangkap dan Kelautan serta Dukungan Manajemen dengan kegiatan yang telah disusun yakni sebagai berikut :

Tabel 20 Alokasi Anggaran Kegiatan PPN Ternate Tahun 2026

KODE	KEGIATAN	ALOKASI
<u>2338</u>	Pengelolaan Pelabuhan Perikanan	658.976.000
<u>2342</u>	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Perikanan tangkap	11.680.601.000
JUMLAH PAGU		12.339.576.000

Realisasi anggaran pada Triwulan 1 tahun 2026 sebesar Rp 4.299.893.301,- atau sebesar 34,85% dari pagu yang ditetapkan. Secara rinci realisasi anggaran berdasarkan kegiatan dan jenis belanja disajikan pada lampiran.

BAB IV. PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Laporan kinerja merupakan bentuk pertanggungjawaban keberhasilan atau kegagalan suatu instansi pemerintah atas pelaksanaan tujuan dan sasaran organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam kaitan tersebut, Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate menyusun Laporan Kinerja yang merupakan bentuk pertanggungjawaban dari pelaksanaan program dan kegiatan Triwulan 1 2026. Laporan Kinerja ini diharapkan dapat menjadi informasi mengenai Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate sekaligus menjadi bahan masukan bagi peningkatan akuntabilitas kinerja pada masa yang akan datang.

Pencapaian kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate pada Triwulan 1 2026 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Secara umum, Nilai Kinerja Organisasi (NKO) PPN Ternate adalah 97,11% dengan rincian sebagai berikut:

Kode	Sasaran/Indikator Kinerja	Satuan	Target 2026	Target TW1	Capaian TW 1	%
S.01	Nilai PNB Sektor Perikanan Tangkap Meningkat di Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate				96,28	
IK.01	Penerimaan PNB Non SDA di Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate (Rp. Juta)	Rp. Juta	2.369,03	592,26	570,24	96,28
S.02	Produktivitas Perikanan Tangkap di Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate Meningkat				66,16	
IK.02	Volume Produksi Perikanan Tangkap di Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate	Ton	4.100,00	1.025,00	678,09	66,16
S.03	Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate yang Optimal dan Bertanggung Jawab				109,7	
IK.03	Persentase permohonan pengusahaan yang dianalisa dan/atau dievaluasi di Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate	Persen	100	0		
IK.04	Tingkat Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate	Nilai	88	88	90,5	102,8
IK.05	Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate	Persen	60	0		
IK.06	Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate	Persen	82	0		
IK.07	Nilai Pengendalian Lingkungan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate	Nilai	33	33	84	120
S.04	Pengelolaan awak kapal perikanan, kapal perikanan dan alat penangkapan ikan berkelanjutan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate				99,53	
IK.08	Kapal Perikanan izin daerah yang memenuhi ketentuan	Kapal	497	422	420	99,53
IK.09	Tingkat Pemenuhan Persyaratan Bekerja Awak Kapal Perikanan	Nilai	0,28	0		

Kode	Sasaran/Indikator Kinerja	Satuan	Target 2026	Target TW1	Capaian TW 1	%
S.05	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik di Lingkungan Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate				113,88	
IK.10	Nilai PM Pembangunan Zona integritas Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate	Nilai	75,5	0		
IK.11	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate Data Dukung1 Data Dukung2	Persen	86	86	100	116,3
IK.12	Nilai PM SAKIP Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate	Nilai	88,2	0		
IK.13	Indeks Profesionalisme ASN di Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate	Indeks	84,5	0		
IK.14	Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP di Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate	Persen	77	77	100	120
IK.15	Persentase Pengelolaan BMN di Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate	Persen	82	0		
IK.16	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate	Nilai	92,1	0		
IK.17	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate	Nilai	71,75	0		
IK.18	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate	Nilai	88,8	88,8	93,56	105,4

- Dari 5 Sasaran Kegiatan, terdapat 2 sasaran kegiatan yang tidak tercapai 100% yaitu Nilai PNBPN Sektor Perikanan tangkap dan produktivitas Perikanan tangkap di Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate.
- Dari 18 (sebelas) IKU yang diukur di Triwulan 1 tahun 2026 hanya 8 (delapan) IKU, dan 3 (tiga) diantaranya belum dapat mencapai target triwulan 1, yaitu IKU PNBPN, IKU Produksi Perikanan Tangkap dan IKU Kapal Perizinan daerah yang memenuhi ketentuan.
-

4.2 REKOMENDASI PERBAIKAN

Adapun langkah-langkah yang akan dilaksanakan di triwulan berikutnya untuk mendorong pencapaian Indikator Kinerja baik yang belum tercapai di Triwulan 1 maupun yang akan dilakukan pengukuran capaian di triwulan 3 2026, antara lain:

- Melakukan evaluasi pelayanan PNBPN yang nilai realisasi masih di bawah target tahunan, salah satunya mengoptimalkan pemanfaatan fasilitas alat transportasi yang pemanfaatannya masih rendah dengan mempromosikan kepada pengguna jasa;

- 2) Meningkatkan volume produksi, melalui koordinasi dengan PSDKP terkait masih adanya kapal perikanan yang mendaratkan ikan di pelabuhan tangkahan serta koordinasi dengan UPI dan pelaku usaha di PPN Ternate untuk dapat membeli semua jenis ikan yang diaratkan di PPN ternate
- 3) Mengevaluasi operasional fasilitas yang menggunakan daya Listrik tinggi dalam rangka mendukung efisiensi pemanfaatan Listrik;
- 4) Untuk memaksimalkan pemeriksaan Kelaikan Kapal Perikanan terhadap perizinan Sertifikat Kelaikan kapal Perikanan, akan dilakukan penempatan petugas yang telah memiliki Brevet SKKP di beberpaa Pelabuhan Binaan, sehingga jika ada pemogohan SKKP akan memudahkan dan mempercepat proses pengurusan dokumen SKKP;
- 5) Berkoordinasi dengan Kantor Kesehatan Pelabuhan terkait pendataan Surat Keterangan Kesehatan yang telah dimiliki setiap kapal perikanan yang melakukan pengurusan SPB;
- 6) Menugaskan Pegawai untuk mengikuti Diklat 20 JP, dalam rangka peningkatan IP ASN yang belum memenuhi target tahun 2026;
- 7) Untuk meningkatkan pemenuhan dokumen WBK, akan dilakukan Upaya percepatan dengan melakukan pemenuhan dokumen di setiap area pengungkit secara berkala.



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3521782
LAMAN www.kkp.go.id

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA TERNATE
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Kamarudin**

Jabatan : Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : **Lotharia Latif**

Jabatan : Direktur Jenderal Perikanan Tangkap

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2026

Pihak Kedua
Direktur Jenderal Perikanan Tangkap

Lotharia Latif

Pihak Pertama
Kepala Pelabuhan Perikanan
Nusantara Ternate



Kamarudin



LAMPIRAN

TRIWULAN I

2026 |



**PELABUHAN PERIKANAN
NUSANTARA TERNATE**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA TERNATE
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET
Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan				
1.	Nilai PNBP Sektor Perikanan Tangkap Meningkat di Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate	1.	Penerimaan PNBP Non SDA di Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate (Rp. Juta)	2.369,031
2.	Produktivitas Perikanan Tangkap di Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate Meningkat	2.	Volume Produksi Perikanan Tangkap di Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate (Ton)	4.100
3.	Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate yang Optimal dan Bertanggung Jawab	3.	Persentase permohonan pengusahaan yang dianalisa dan/atau dievaluasi di Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate (Persen)	100
		4.	Tingkat Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate (Nilai)	88
		5.	Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate (persen)	60
		6.	Persentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate (persen)	82
		7.	Nilai Pengendalian Lingkungan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate (Nilai)	33
4.	Pengelolaan awak kapal perikanan, kapal perikanan dan alat penangkapan ikan berkelanjutan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate	8.	Kapal Perikanan izin daerah yang memenuhi ketentuan (kapal)	497
		9.	Tingkat Pemenuhan Persyaratan Bekerja Awak Kapal Perikanan (Nilai)	0,28
5.	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik di Lingkungan Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate	10.	Nilai PM Pembangunan Zona integritas Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate yang Telah Dinilai WBK (Nilai)	75,50
		11.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate (Persen)	86
		12.	Nilai PM SAKIP Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate (Nilai)	88,20
		13.	Indeks Profesionalisme ASN di Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate (Indeks)	84,50
		14.	Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP di Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate	77

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET
		15.	Persentase Pengelolaan BMN di Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate (Persen)	82
		16.	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate (Nilai)	92,10
		17.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate (Nilai)	71,75
		18.	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Lingkup Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate (Indeks)	88,80

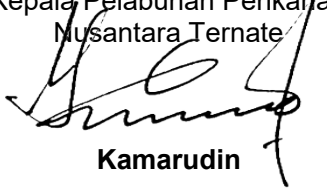
Data Anggaran:

KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
Pengelolaan Pelabuhan Perikanan	1.293.563.000
Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Perikanan Tangkap	11.798.025.000
Total Anggaran PPN Ternate Tahun 2026	13.091.588.000

Jakarta, Januari 2026

Pihak Kedua
Direktur Jenderal Perikanan Tangkap

Lotharia Latif

Pihak Pertama
Kepala Pelabuhan Perikanan
Nusantara Ternate

Kamarudin

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2026

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Maret 2026

Kementerian : 032 KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Unit Organisasi : 03 DITJEN PERIKANAN TANGKAP
Satuan Kerja : 427661 PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA TERNATE

Hal 1 dari 16

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2026				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
JUMLAH SELURUHNYA	12,339,576,000	0	3,089,794,797	1,210,098,504	4,299,893,301	34.85 %	8,039,682,699
HB Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	658,975,000	0	47,559,082	7,903,300	55,462,382	8.42 %	603,512,618
HB.2338 Pengelolaan Pelabuhan Perikanan	658,975,000	0	47,559,082	7,903,300	55,462,382	8.42 %	603,512,618
BGA Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Ekonomi	658,975,000	0	47,559,082	7,903,300	55,462,382	8.42 %	603,512,618
BGA.002 Pelabuhan perikanan UPT Pusat dan Perintis yang dikelola dan operasional sesuai standar	658,975,000	0	47,559,082	7,903,300	55,462,382	8.42 %	603,512,618
051 Pelaksanaan Tata kelola dan Operasional kesyahbandaran di pelabuhan perikanan	56,755,000	0	14,504,848	0	14,504,848	25.56 %	42,250,152
051.OA Penyiapan dan Pelaksanaan Kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan	23,640,000	0	0	0	0	0.00 %	23,640,000
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	16,100,000	0	0	0	0	0.00 %	16,100,000
000001. Pencetakan Blanko Pendukung Operasional Kesyahbandaran	2,100,000	0	0	0	0	0.00 %	2,100,000
000002. ATK	14,000,000	0	0	0	0	0.00 %	14,000,000
524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	7,540,000	0	0	0	0	0.00 %	7,540,000
000003. Transportasi Perjalanan dalam Rangka Rakornis Kesyahbandaran	6,800,000	0	0	0	0	0.00 %	6,800,000
000004. Hotel/Penginapan Perjalanan dalam Rangka Rakornis Kesyahbandaran	584,000	0	0	0	0	0.00 %	584,000
000005. Uang Harian Perjalanan dalam Rangka Rakornis Kesyahbandaran	156,000	0	0	0	0	0.00 %	156,000
051.OB Rapat Koordinasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kesyahbandaran Dalam Rangka dalam rangka mendukung PNBK Pasca produksi dan Penangkapan Ikan Terukur (PIT)	22,935,000	0	11,874,848	0	11,874,848	51.78 %	11,060,152
521211 Belanja Bahan	1,335,000	0	0	0	0	0.00 %	1,335,000
000006. Makan Rapat Biasa MALUKU UTARA	945,000	0	0	0	0	0.00 %	945,000
000007. Snack Rapat Biasa MALUKU UTARA	390,000	0	0	0	0	0.00 %	390,000
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	18,000,000	0	11,874,848	0	11,874,848	65.97 %	6,125,152
000008. Transportasi Perjalanan dalam rangka Rapat Koordinasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kesyahbandaran Dalam Rangka Mendukung Pelaksanaan	13,600,000	0	7,474,848	0	7,474,848	54.96 %	6,125,152
000009. Hotel/Penginapan Perjalanan dalam rangka Rapat Koordinasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kesyahbandaran Dalam Rangka Mendukung Pelaksanaan	2,336,000	0	2,336,000	0	2,336,000	100.00	0
000010. Uang Harian Perjalanan dalam rangka Rapat Koordinasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kesyahbandaran	2,064,000	0	2,064,000	0	2,064,000	100.00	0

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2026

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Maret 2026

Kementerian : 032 KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Unit Organisasi 03 DITJEN PERIKANAN TANGKAP
Satuan Kerja : 427661 PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA TERNATE

Hal 2 dari 16

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2026				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
Dalam Rangka Mendukung Pelaksanaan P	2,064,000	0	2,064,000	0			0
524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	3,600,000	0	0	0	0	0.00 %	3,600,000
000011. Uang Transport	2,040,000	0	0	0	0	0.00 %	2,040,000
000012. Uang Harian	1,560,000	0	0	0	0	0.00 %	1,560,000
051.0C Sosialisasi Kesyahbandaran Terkait Pengawakan Kapal Perikanan	10,180,000	0	2,630,000	0	2,630,000	25.83 %	7,550,000
521211 Belanja Bahan	1,150,000	0	0	0	0	0.00 %	1,150,000
000013. Makan Rapat Biasa MALUKU UTARA	814,000	0	0	0	0	0.00 %	814,000
000014. Snack Rapat Biasa MALUKU UTARA	336,000	0	0	0	0	0.00 %	336,000
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	9,000,000	0	2,630,000	0	2,630,000	29.22 %	6,370,000
000015. Transportasi Konsultasi Kepusat	6,800,000	0	2,630,000	0	2,630,000	38.68 %	4,170,000
000016. Hotel/Penginapan Konsultasi Kepusat	1,168,000	0	0	0	0	0.00 %	1,168,000
000017. Uang Harian Konsultasi Kepusat	1,032,000	0	0	0	0	0.00 %	1,032,000
524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	30,000	0	0	0	0	0.00 %	30,000
000019. Uang Harian	30,000	0	0	0	0	0.00 %	30,000
052 Pelaksanaan Tata Kelola dan Operasional Sertifikasi Hasil Tangkapan Ikan (SHTI) di Pelabuhan Perikanan	19,893,000	0	0	0	0	0.00 %	19,893,000
052.0A Monitoring dan Evaluasi SHTI	19,893,000	0	0	0	0	0.00 %	19,893,000
521211 Belanja Bahan	1,335,000	0	0	0	0	0.00 %	1,335,000
000020. Makan Rapat	945,000	0	0	0	0	0.00 %	945,000
000021. Snack Rapat	390,000	0	0	0	0	0.00 %	390,000
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	18,528,000	0	0	0	0	0.00 %	18,528,000
000022. Transportasi Konsultasi Kepusat	6,800,000	0	0	0	0	0.00 %	6,800,000
000023. Transportasi Perjalanan Dinas dalam rangka Koordinasi dengan instansi terkait SHTI di Pelabuhan Perikanan	3,400,000	0	0	0	0	0.00 %	3,400,000
000024. Hotel/Penginapan Perjalanan Dinas dalam rangka Koordinasi dengan instansi terkait SHTI di Pelabuhan Perikanan	584,000	0	0	0	0	0.00 %	584,000
000025. Uang Harian Perjalanan Dinas dalam rangka Koordinasi dengan instansi terkait SHTI di Pelabuhan Perikanan	516,000	0	0	0	0	0.00 %	516,000

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2026

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Maret 2026

Kementerian : 032 KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Unit Organisasi 03 DITJEN PERIKANAN TANGKAP
Satuan Kerja : 427661 PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA TERNATE

Hal 3 dari 16

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2026				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
000026. Hotel/Penginapan Konsultasi Kepusat	1,168,000	0	0	0	0	0.00 %	1,168,000
000027. Uang Harian Konsultasi Kepusat	1,032,000	0	0	0	0	0.00 %	1,032,000
000028. Transportasi Perjalanan Dinas Dalam Rangka Monitoring Penerapan Sertifikasi Hasil Tangkapan Ikan di Pelabuhan Perikanan	1,200,000	0	0	0	0	0.00 %	1,200,000
000029. Hotel/Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Rangka Monitoring Penerapan Sertifikasi Hasil Tangkapan Ikan di Pelabuhan Perikanan	960,000	0	0	0	0	0.00 %	960,000
000030. Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Rangka Monitoring Penerapan Sertifikasi Hasil Tangkapan Ikan di Pelabuhan Perikanan	1,032,000	0	0	0	0	0.00 %	1,032,000
000031. Transportasi Perjalanan dalam rangka koordinasi SHTI di Pelabuhan Binaan	600,000	0	0	0	0	0.00 %	600,000
000032. Hotel /Penginapan Perjalanan dalam rangka koordinasi SHTI di Pelabuhan Binaan	720,000	0	0	0	0	0.00 %	720,000
000033. Uang Harian Perjalanan dalam rangka koordinasi SHTI di Pelabuhan Binaan	516,000	0	0	0	0	0.00 %	516,000
524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	30,000	0	0	0	0	0.00 %	30,000
000035. Uang Harian	30,000	0	0	0	0	0.00 %	30,000
053 Pelaksanaan tata kelola dan operasional cara penanganan ikan yang baik (CPIB) dan Inspeksi Pembongkaran ikan di pelabuhan perikanan	57,878,000	0	25,891,834	0	25,891,834	44.74 %	31,986,166
053.OA Sosialisasi Cara Penanganan Ikan yang baik	14,680,000	0	11,832,334	0	11,832,334	80.60 %	2,847,666
521211 Belanja Bahan	1,150,000	0	0	0	0	0.00 %	1,150,000
000036. Makan Rapat	814,000	0	0	0	0	0.00 %	814,000
000037. Snack Rapat	336,000	0	0	0	0	0.00 %	336,000
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	13,500,000	0	11,832,334	0	11,832,334	87.65 %	1,667,666
000038. Transportasi Konsultasi Kepusat	10,200,000	0	8,532,334	0	8,532,334	83.65 %	1,667,666
000039. Hotel/Penginapan Konsultasi Kepusat	1,752,000	0	1,752,000	0	1,752,000	100.00	0
000040. Uang Harian Konsultasi Kepusat	1,548,000	0	1,548,000	0	1,548,000	100.00	0
524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	30,000	0	0	0	0	0.00 %	30,000
000042. Uang Harian	30,000	0	0	0	0	0.00 %	30,000
053.OB Operasional Pembinaan Mutu di Pelabuhan Perikanan	43,198,000	0	14,059,500	0	14,059,500	32.55 %	29,138,500
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya	17,500,000	0	1,070,000	0	1,070,000	6.11 %	16,430,000

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2026

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Maret 2026

Kementerian : 032 KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Unit Organisasi 03 DITJEN PERIKANAN TANGKAP
Satuan Kerja : 427661 PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA TERNATE

Hal 4 dari 16

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2026				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
000043. Belanja Operasional Pelayanan Jasa	17,500,000	0	1,070,000	0	1,070,000	6.11 %	16,430,000
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	25,578,000	0	12,989,500	0	12,989,500	50.78 %	12,588,500
000044. Transportasi Perjalanan dalam rangka pembinaan Mutu di Pelabuhan Binaan	6,618,000	0	6,618,000	0	6,618,000	100.00	0
000045. Hotel/Penginapan Perjalanan dalam rangka Pembinaan Mutu di Pelabuhan Binaan	4,800,000	0	2,242,000	0	2,242,000	46.71 %	2,558,000
000046. Uang Harian Perjalanan dalam rangka Pembinaan Mutu di Pelabuhan Binaan	5,160,000	0	4,129,500	0	4,129,500	80.03 %	1,030,500
000047. Transportasi Konsultasi Kepusat	6,800,000	0	0	0	0	0.00 %	6,800,000
000048. Hotel/Penginapan Konsultasi Kepusat	1,168,000	0	0	0	0	0.00 %	1,168,000
000049. Uang Harian Konsultasi Kepusat	1,032,000	0	0	0	0	0.00 %	1,032,000
524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	120,000	0	0	0	0	0.00 %	120,000
000051. Uang Harian	120,000	0	0	0	0	0.00 %	120,000
054 Pelaksanaan tata kelola dan operasional perusahaan di pelabuhan perikanan	305,659,000	0	2,875,000	2,050,000	4,925,000	1.61 %	300,734,000
054.OA Bahan dan Perlengkapan Mesin Pendingin	76,057,000	0	0	0	0	0.00 %	76,057,000
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya	56,031,000	0	0	0	0	0.00 %	56,031,000
000052. Freon (R22) Mesin BITZER	21,353,000	0	0	0	0	0.00 %	21,353,000
000053. Oli Suniso 4GS	5,320,000	0	0	0	0	0.00 %	5,320,000
000054. Oli Emkarate	10,108,000	0	0	0	0	0.00 %	10,108,000
000055. Freon 404 A Mesin Copeland	19,250,000	0	0	0	0	0.00 %	19,250,000
523121 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	20,026,000	0	0	0	0	0.00 %	20,026,000
000056. Pemeliharaan Cold Storage	20,026,000	0	0	0	0	0.00 %	20,026,000
054.OB Bahan dan Perlengkapan Bengkel	28,669,000	0	0	0	0	0.00 %	28,669,000
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya	28,669,000	0	0	0	0	0.00 %	28,669,000
000057. Operasional Perbengkelan	21,295,000	0	0	0	0	0.00 %	21,295,000
000058. Sepatu Safety Petugas Perbengkelan	3,081,000	0	0	0	0	0.00 %	3,081,000
000059. Wearpack Petugas Perbengkelan	1,403,000	0	0	0	0	0.00 %	1,403,000
000060. Wearpack Petugas Mesin Pendingin	2,890,000	0	0	0	0	0.00 %	2,890,000
054.OC Publikasi/Promosi Pelabuhan Perikanan	39,229,000	0	2,875,000	2,050,000	4,925,000	12.55 %	34,304,000

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2026

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Maret 2026

Kementerian : 032 KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Unit Organisasi 03 DITJEN PERIKANAN TANGKAP
Satuan Kerja : 427661 PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA TERNATE

Hal 5 dari 16

Uraian		Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2026				SISA ANGGARAN
				Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
521211	Belanja Bahan	32,229,000	0	375,000	150,000	525,000	1.63 %	31,704,000
	000063. Baliho/Spanduk/Banner	24,669,000	0	375,000	150,000	525,000	2.13 %	24,144,000
	000064. Kalender	7,560,000	0	0	0	0	0.00 %	7,560,000
522191	Belanja Jasa Lainnya	7,000,000	0	2,500,000	1,900,000	4,400,000	62.86 %	2,600,000
	000289. Publikasi Media Cetak dan Elektronik	7,000,000	0	2,500,000	1,900,000	4,400,000	62.86 %	2,600,000
054.0D	Temu Usaha Perikanan dalam rangka mengevaluasi tingkat kepatuhan dan tingkat pelayanan	62,205,000	0	0	0	0	0.00 %	62,205,000
521211	Belanja Bahan	4,005,000	0	0	0	0	0.00 %	4,005,000
	000065. Makan Rapat	2,835,000	0	0	0	0	0.00 %	2,835,000
	000066. Snack Rapat	1,170,000	0	0	0	0	0.00 %	1,170,000
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	35,000,000	0	0	0	0	0.00 %	35,000,000
	000067. ATK Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Usaha	35,000,000	0	0	0	0	0.00 %	35,000,000
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	12,400,000	0	0	0	0	0.00 %	12,400,000
	000068. Transportasi Konsultasi Kepusat	10,200,000	0	0	0	0	0.00 %	10,200,000
	000069. Hotel/Penginapan Konsultasi Kepusat	1,168,000	0	0	0	0	0.00 %	1,168,000
	000070. Uang Harian Konsultasi Kepusat	1,032,000	0	0	0	0	0.00 %	1,032,000
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	10,800,000	0	0	0	0	0.00 %	10,800,000
	000071. Uang Transport	6,120,000	0	0	0	0	0.00 %	6,120,000
	000072. Uang Harian	4,680,000	0	0	0	0	0.00 %	4,680,000
054.0E	Peningkatan Pelayanan Publik	33,370,000	0	0	0	0	0.00 %	33,370,000
521211	Belanja Bahan	2,892,000	0	0	0	0	0.00 %	2,892,000
	000073. Makan Rapat	2,047,000	0	0	0	0	0.00 %	2,047,000
	000074. Snack Rapat	845,000	0	0	0	0	0.00 %	845,000
522151	Belanja Jasa Profesi	1,800,000	0	0	0	0	0.00 %	1,800,000
	000075. Narsumber dari Psikolog	1,800,000	0	0	0	0	0.00 %	1,800,000
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	28,678,000	0	0	0	0	0.00 %	28,678,000
	000076. Paket Fullboard dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Publik	20,878,000	0	0	0	0	0.00 %	20,878,000

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2026

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Maret 2026

Kementerian : 032 KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Unit Organisasi 03 DITJEN PERIKANAN TANGKAP
Satuan Kerja : 427661 PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA TERNATE

Hal 6 dari 16

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2026				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
000077. Uang Transport	4,420,000	0	0	0	0	0 0.00 %	4,420,000
000078. Uang Harian Peserta	3,380,000	0	0	0	0	0 0.00 %	3,380,000
054.0F Review SOP dan Forum Konsultasi Publik Standar Pelayanan	13,750,000	0	0	0	0	0 0.00 %	13,750,000
521211 Belanja Bahan	1,150,000	0	0	0	0	0 0.00 %	1,150,000
000079. Makan Rapat	814,000	0	0	0	0	0 0.00 %	814,000
000080. Snack Rapat	336,000	0	0	0	0	0 0.00 %	336,000
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	9,000,000	0	0	0	0	0 0.00 %	9,000,000
000081. Transportasi Konsultasi Kepusat	6,800,000	0	0	0	0	0 0.00 %	6,800,000
000082. Hotel/Penginapan Konsultasi Kepusat	1,168,000	0	0	0	0	0 0.00 %	1,168,000
000083. Uang Harian Konsultasi Kepusat	1,032,000	0	0	0	0	0 0.00 %	1,032,000
524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	3,600,000	0	0	0	0	0 0.00 %	3,600,000
000084. Transport Lokal	2,040,000	0	0	0	0	0 0.00 %	2,040,000
000085. Uang Harian	1,560,000	0	0	0	0	0 0.00 %	1,560,000
054.0G Sosialisasi Mekanisme Sewa Lahan dan Bangunan	13,855,000	0	0	0	0	0 0.00 %	13,855,000
521211 Belanja Bahan	1,255,000	0	0	0	0	0 0.00 %	1,255,000
000086. Makan Rapat	814,000	0	0	0	0	0 0.00 %	814,000
000087. Snack Rapat	336,000	0	0	0	0	0 0.00 %	336,000
000088. Spanduk	105,000	0	0	0	0	0 0.00 %	105,000
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	9,000,000	0	0	0	0	0 0.00 %	9,000,000
000089. Transportasi Konsultasi Kepusat	6,800,000	0	0	0	0	0 0.00 %	6,800,000
000090. Hotel/Penginapan Konsultasi Kepusat	1,168,000	0	0	0	0	0 0.00 %	1,168,000
000091. Uang Harian Konsultasi Kepusat	1,032,000	0	0	0	0	0 0.00 %	1,032,000
524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	3,600,000	0	0	0	0	0 0.00 %	3,600,000
000092. Transport Lokal	2,040,000	0	0	0	0	0 0.00 %	2,040,000
000093. Uang Harian	1,560,000	0	0	0	0	0 0.00 %	1,560,000
054.0H Monev SPBUN dan kegiatan yang mendukung layanan pengusaha	16,040,000	0	0	0	0	0 0.00 %	16,040,000

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2026

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Maret 2026

Kementerian : 032 KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Unit Organisasi 03 DITJEN PERIKANAN TANGKAP
Satuan Kerja : 427661 PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA TERNATE

Hal 7 dari 16

Uraian		Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2026				SISA ANGGARAN
				Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
521211	Belanja Bahan	1,150,000	0	0	0	0	0.00 %	1,150,000
	000094. Makan Rapat	814,000	0	0	0	0	0.00 %	814,000
	000095. Snack Rapat	336,000	0	0	0	0	0.00 %	336,000
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	13,500,000	0	0	0	0	0.00 %	13,500,000
	000096. Transportasi Konsultasi Kepusat	10,200,000	0	0	0	0	0.00 %	10,200,000
	000097. Hotel/Penginapan Konsultasi Kepusat	1,752,000	0	0	0	0	0.00 %	1,752,000
	000098. Uang Harian Konsultasi Kepusat	1,548,000	0	0	0	0	0.00 %	1,548,000
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	1,390,000	0	0	0	0	0.00 %	1,390,000
	000100. Uang Harian	1,390,000	0	0	0	0	0.00 %	1,390,000
054.01	Audit Surveillance Sertifikasi ISO 9001:2015	22,484,000	0	0	0	0	0.00 %	22,484,000
522191	Belanja Jasa Lainnya	14,000,000	0	0	0	0	0.00 %	14,000,000
	000101. Audit Surveillance ISO 9001:2015	14,000,000	0	0	0	0	0.00 %	14,000,000
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	8,484,000	0	0	0	0	0.00 %	8,484,000
	000102. Transportasi Konsultasi Kepusat	6,800,000	0	0	0	0	0.00 %	6,800,000
	000103. Hotel/Penginapan Konsultasi Kepusat	1,168,000	0	0	0	0	0.00 %	1,168,000
	000104. Uang Harian Konsultasi Kepusat	516,000	0	0	0	0	0.00 %	516,000
055	Pelaksanaan tata kelola dan operasional K5 di Pelabuhan Perikanan	169,143,000	0	4,287,400	5,853,300	10,140,700	6.00 %	159,002,300
055.0A	Operasional K5 di Pelabuhan Perikanan	67,486,000	0	4,287,400	5,853,300	10,140,700	15.03 %	57,345,300
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	67,486,000	0	4,287,400	5,853,300	10,140,700	15.03 %	57,345,300
	000105. Bahan dan Perlengkapan K5	67,486,000	0	4,287,400	5,853,300	10,140,700	15.03 %	57,345,300
055.0B	Gerakan Bersih Pelabuhan	36,635,000	0	0	0	0	0.00 %	36,635,000
521211	Belanja Bahan	36,635,000	0	0	0	0	0.00 %	36,635,000
	000106. Spanduk	350,000	0	0	0	0	0.00 %	350,000
	000107. Perlengkapan Peserta	29,610,000	0	0	0	0	0.00 %	29,610,000
	000108. Makan Rapat	4,725,000	0	0	0	0	0.00 %	4,725,000
	000109. Snack Rapat	1,950,000	0	0	0	0	0.00 %	1,950,000
055.0C	Audit Surveillance Sertifikasi ISO 14001:2015	9,000,000	0	0	0	0	0.00 %	9,000,000

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2026

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Maret 2026

Kementerian : 032 KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Unit Organisasi 03 DITJEN PERIKANAN TANGKAP
Satuan Kerja : 427661 PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA TERNATE

Hal 8 dari 16

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2026				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	9,000,000	0	0	0	0	0.00 %	9,000,000
000110. Transportasi Konsultasi Kepusat	6,800,000	0	0	0	0	0.00 %	6,800,000
000111. Hotel/Penginapan Konsultasi Kepusat	1,168,000	0	0	0	0	0.00 %	1,168,000
000112. Uang Harian Konsultasi Kepusat	1,032,000	0	0	0	0	0.00 %	1,032,000
055.0D Sosialisasi dan Simulasi Pemadaman Kebakaran	21,222,000	0	0	0	0	0.00 %	21,222,000
521211 Belanja Bahan	4,550,000	0	0	0	0	0.00 %	4,550,000
000113. Refil Tabung Pemadam	4,550,000	0	0	0	0	0.00 %	4,550,000
522151 Belanja Jasa Profesi	3,472,000	0	0	0	0	0.00 %	3,472,000
000114. Honorarium Narasumber	3,472,000	0	0	0	0	0.00 %	3,472,000
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	9,000,000	0	0	0	0	0.00 %	9,000,000
000115. Transportasi Konsultasi Kepusat	6,800,000	0	0	0	0	0.00 %	6,800,000
000116. Hotel/Penginapan Konsultasi Kepusat	1,168,000	0	0	0	0	0.00 %	1,168,000
000117. Uang Harian Konsultasi Kepusat	1,032,000	0	0	0	0	0.00 %	1,032,000
524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	4,200,000	0	0	0	0	0.00 %	4,200,000
000118. Uang Harian	1,820,000	0	0	0	0	0.00 %	1,820,000
000119. Uang Transport	2,380,000	0	0	0	0	0.00 %	2,380,000
055.0E Rapat Koordinasi K5 di Pelabuhan Perikanan	34,800,000	0	0	0	0	0.00 %	34,800,000
521211 Belanja Bahan	17,800,000	0	0	0	0	0.00 %	17,800,000
000287. Makan Rapat	12,600,000	0	0	0	0	0.00 %	12,600,000
000288. Snack Rapat	5,200,000	0	0	0	0	0.00 %	5,200,000
524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	17,000,000	0	0	0	0	0.00 %	17,000,000
000285. Transport Lokal	8,500,000	0	0	0	0	0.00 %	8,500,000
000286. Uang Harian	8,500,000	0	0	0	0	0.00 %	8,500,000
057 Pelaksanaan tata kelola dan operasional PIPP di pelabuhan perikanan	49,647,000	0	0	0	0	0.00 %	49,647,000
057.0A Pengolahan dan verifikasi data PIPP di pelabuhan perikanan	18,684,000	0	0	0	0	0.00 %	18,684,000
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	18,684,000	0	0	0	0	0.00 %	18,684,000
000120. Transportasi Perjalanan Dinas Kepelabuhan Binaan	1,200,000	0	0	0	0	0.00 %	1,200,000

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2026

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Maret 2026

Kementerian : 032 KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Unit Organisasi 03 DITJEN PERIKANAN TANGKAP
Satuan Kerja : 427661 PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA TERNATE

Hal 9 dari 16

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2026				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
000121. Hotel/Penginapan Perjalanan Dinas Kepelabuhan Binaan	1,920,000	0	0	0	0	0.00 %	1,920,000
000122. Uang Harian Perjalanan Dinas Kepelabuhan Binaan	2,064,000	0	0	0	0	0.00 %	2,064,000
000123. Transportasi dalam rangka verifikasi data	10,200,000	0	0	0	0	0.00 %	10,200,000
000124. Hotel/Penginpaan dalam rangka verifikasi data	1,752,000	0	0	0	0	0.00 %	1,752,000
000125. Uang Harian dalam rangka verifikasi data	1,548,000	0	0	0	0	0.00 %	1,548,000
057.0B Pendampingan UPT Pusat pada Pelabuhan Perikanan Binaan dalam rangka Implementasi PIT dan PNPB Pasca Produksi	14,184,000	0	0	0	0	0.00 %	14,184,000
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	14,184,000	0	0	0	0	0.00 %	14,184,000
000126. Transportasi Perjalanan Dinas Kepelabuhan Binaan	3,600,000	0	0	0	0	0.00 %	3,600,000
000127. Hotel/Penginapan Perjalanan Dinas Kepelabuhan Binaan	3,360,000	0	0	0	0	0.00 %	3,360,000
000128. Uang Harian Perjalanan Dinas Kepelabuhan Binaan	7,224,000	0	0	0	0	0.00 %	7,224,000
057.0C Rapat Koordinasi Pelaksanaan PIPP di Pelabuhan Binaan	16,779,000	0	0	0	0	0.00 %	16,779,000
521211 Belanja Bahan	4,539,000	0	0	0	0	0.00 %	4,539,000
000129. Makan Rapat	3,213,000	0	0	0	0	0.00 %	3,213,000
000130. Snack Rapat	1,326,000	0	0	0	0	0.00 %	1,326,000
524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	12,240,000	0	0	0	0	0.00 %	12,240,000
000131. Transport Lokal	6,936,000	0	0	0	0	0.00 %	6,936,000
000132. Uang Harian	5,304,000	0	0	0	0	0.00 %	5,304,000
WA Program Dukungan Manajemen	11,680,601,000	0	3,042,235,715	1,202,195,204	4,244,430,919	36.34 %	7,436,170,081
WA.2342 Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Perikanan Tangkap	11,680,601,000	0	3,042,235,715	1,202,195,204	4,244,430,919	36.34 %	7,436,170,081
CAN Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	12,500,000	0	0	0	0	0.00 %	12,500,000
CAN.955 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	12,500,000	0	0	0	0	0.00 %	12,500,000
051 Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	12,500,000	0	0	0	0	0.00 %	12,500,000
051.0A Fasilitas Penunjang	12,500,000	0	0	0	0	0.00 %	12,500,000
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin	12,500,000	0	0	0	0	0.00 %	12,500,000
000133. Pengadaan Laptop	7,500,000	0	0	0	0	0.00 %	7,500,000
000134. Pengadaan PC	5,000,000	0	0	0	0	0.00 %	5,000,000

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2026

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Maret 2026

Kementerian : 032 KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Unit Organisasi 03 DITJEN PERIKANAN TANGKAP
Satuan Kerja : 427661 PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA TERNATE

Hal 10 dari 16

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2026				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	11,555,677,000	0	3,042,235,715	1,202,195,204	4,244,430,919	36.73 %	7,311,246,081
EBA.994 Layanan Perkantoran	11,555,677,000	0	3,042,235,715	1,202,195,204	4,244,430,919	36.73 %	7,311,246,081
001 Gaji dan Tunjangan	7,878,901,000	0	1,098,503,496	1,017,384,237	2,115,887,733	26.86 %	5,763,013,267
001.0A Pembayaran gaji dan tunjangan	7,878,901,000	0	1,098,503,496	1,017,384,237	2,115,887,733	26.86 %	5,763,013,267
511111 Belanja Gaji Pokok PNS	1,631,529,000	0	350,462,160	234,339,640	584,801,800	35.84 %	1,046,727,200
000135. Belanja Gaji Pokok PNS	1,398,455,000	0	350,462,160	117,674,620	468,136,780	33.48 %	930,318,220
000136. Belanja Gaji Pokok PNS (gaji ke 13)	116,537,000	0	0	0	0	0.00 %	116,537,000
000137. Belanja Gaji Pokok PNS (gaji ke 14)	116,537,000	0	0	116,665,020	116,665,020	100.11	-128,020
511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS	22,000	0	4,509	3,261	7,770	35.32 %	14,230
000138. Belanja Pembulatan Gaji PNS	20,000	0	4,509	1,932	6,441	32.20 %	13,559
000139. Belanja Pembulatan Gaji PNS (gaji ke 13)	1,000	0	0	0	0	0.00 %	1,000
000140. Belanja Pembulatan Gaji PNS (gaji ke 14)	1,000	0	0	1,329	1,329	132.90	-329
511121 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	118,748,000	0	25,456,106	17,037,414	42,493,520	35.78 %	76,254,480
000141. Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	101,784,000	0	25,456,106	8,564,472	34,020,578	33.42 %	67,763,422
000142. Belanja Tunj. Suami/Istri PNS (gaji ke 13)	8,482,000	0	0	0	0	0.00 %	8,482,000
000143. Belanja Tunj. Suami/Istri PNS (gaji ke 14)	8,482,000	0	0	8,472,942	8,472,942	99.89 %	9,058
511122 Belanja Tunj. Anak PNS	37,355,000	0	7,920,961	5,278,040	13,199,001	35.33 %	24,155,999
000144. Belanja Tunj. Anak PNS	32,019,000	0	7,920,961	2,613,419	10,534,380	32.90 %	21,484,620
000145. Belanja Tunj. Anak PNS (gaji ke 13)	2,668,000	0	0	0	0	0.00 %	2,668,000
000146. Belanja Tunj. Anak PNS (gaji ke 14)	2,668,000	0	0	2,664,621	2,664,621	99.87 %	3,379
511123 Belanja Tunj. Struktural PNS	25,200,000	0	5,400,000	3,600,000	9,000,000	35.71 %	16,200,000
000147. Belanja Tunjangan Struktural PNS	21,600,000	0	5,400,000	1,800,000	7,200,000	33.33 %	14,400,000
000148. Belanja Tunjangan Struktural PNS (gaji ke 13)	1,800,000	0	0	0	0	0.00 %	1,800,000
000149. Belanja Tunjangan Struktural PNS (gaji ke 14)	1,800,000	0	0	1,800,000	1,800,000	100.00	0
511124 Belanja Tunj. Fungsional PNS	137,480,000	0	23,010,000	15,460,000	38,470,000	27.98 %	99,010,000
000150. Belanja Tunjangan Fungsional PNS	117,840,000	0	23,010,000	7,910,000	30,920,000	26.24 %	86,920,000
000151. Belanja Tunjangan Fungsional PNS (gaji ke 13)	9,820,000	0	0	0	0	0.00 %	9,820,000

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2026

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Maret 2026

Kementerian : 032 KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Unit Organisasi 03 DITJEN PERIKANAN TANGKAP
Satuan Kerja : 427661 PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA TERNATE

Hal 11 dari 16

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2026				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
000152. Belanja Tunjangan Fungsional PNS (gaji ke 14)	9,820,000	0	0	7,550,000	7,550,000	76.88 %	2,270,000
511125 Belanja Tunj. PPh PNS	13,766,000	0	565,266	6,062,457	6,627,723	48.15 %	7,138,277
000153. Belanja Tunjangan PPh PNS	1,878,000	0	565,266	188,422	753,688	40.13 %	1,124,312
000154. Belanja Tunjangan PPh PNS (gaji ke 13)	5,944,000	0	0	0	0	0.00 %	5,944,000
000155. Belanja Tunjangan PPh PNS (gaji ke 14)	5,944,000	0	0	5,874,035	5,874,035	98.82 %	69,965
511126 Belanja Tunj. Beras PNS	92,262,000	0	18,829,200	12,528,660	31,357,860	33.99 %	60,904,140
000156. Belanja Tunj Beras PNS	79,082,000	0	18,829,200	6,228,120	25,057,320	31.69 %	54,024,680
000157. Belanja Tunj Beras PNS (gaji 13)	6,590,000	0	0	0	0	0.00 %	6,590,000
000158. Belanja Tunj Beras PNS (gaji 14)	6,590,000	0	0	6,300,540	6,300,540	95.61 %	289,460
511129 Belanja Uang Makan PNS	312,576,000	0	21,325,000	19,003,000	40,328,000	12.90 %	272,248,000
000159. Belanja Uang Makan PNS	312,576,000	0	21,325,000	19,003,000	40,328,000	12.90 %	272,248,000
511151 Belanja Tunjangan Umum PNS	41,440,000	0	10,375,000	6,855,000	17,230,000	41.58 %	24,210,000
000160. Belanja Tunjangan Umum PNS	35,520,000	0	10,375,000	3,335,000	13,710,000	38.60 %	21,810,000
000161. Belanja Tunjangan Umum PNS (gaji ke 13)	2,960,000	0	0	0	0	0.00 %	2,960,000
000162. Belanja Tunjangan Umum PNS (gaji ke 14)	2,960,000	0	0	3,520,000	3,520,000	118.92	-560,000
511611 Belanja Gaji Pokok PPPK	1,164,590,000	0	259,238,000	139,217,119	398,455,119	34.21 %	766,134,881
000163. Belanja Gaji Pokok PPPK	998,220,000	0	259,238,000	82,636,200	341,874,200	34.25 %	656,345,800
000164. Belanja Gaji Pokok PPPK (gaji ke 13)	83,185,000	0	0	0	0	0.00 %	83,185,000
000165. Belanja Gaji Pokok PPPK (gaji ke 14)	83,185,000	0	0	56,580,919	56,580,919	68.02 %	26,604,081
511619 Belanja Pembulatan Gaji PPPK	16,000	0	4,595	2,523	7,118	44.49 %	8,882
000166. Belanja Pembulatan Gaji PPPK	14,000	0	4,595	1,313	5,908	42.20 %	8,092
000167. Belanja Pembulatan Gaji PPPK (gaji ke 13)	1,000	0	0	0	0	0.00 %	1,000
000168. Belanja Pembulatan Gaji PPPK (gaji ke 14)	1,000	0	0	1,210	1,210	121.00	-210
511621 Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	73,561,000	0	16,694,720	8,680,254	25,374,974	34.50 %	48,186,026
000169. Belanja Tunj. Suami/Istri PPPK	63,053,000	0	16,694,720	5,181,260	21,875,980	34.69 %	41,177,020
000170. Belanja Tunj. Suami/Istri PPPK (gaji ke 13)	5,254,000	0	0	0	0	0.00 %	5,254,000
000171. Belanja Tunj. Suami/Istri PPPK (gaji ke 14)	5,254,000	0	0	3,498,994	3,498,994	66.60 %	1,755,006

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2026

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Maret 2026

Kementerian : 032 KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Unit Organisasi 03 DITJEN PERIKANAN TANGKAP
Satuan Kerja : 427661 PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA TERNATE

Hal 12 dari 16

Uraian		Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2026				SISA ANGGARAN
				Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
511622	Belanja Tunjangan Anak PPPK	22,162,000	0	5,187,366	2,733,099	7,920,465	35.74 %	14,241,535
	000172. Belanja Tunj. Anak PPPK	18,996,000	0	5,187,366	1,619,434	6,806,800	35.83 %	12,189,200
	000173. Belanja Tunj. Anak PPPK (gaji ke 13)	1,583,000	0	0	0	0	0.00 %	1,583,000
	000174. Belanja Tunj. Anak PPPK (gaji ke 14)	1,583,000	0	0	1,113,665	1,113,665	70.35 %	469,335
511624	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	102,200,000	0	21,060,000	12,220,000	33,280,000	32.56 %	68,920,000
	000175. Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	87,600,000	0	21,060,000	6,460,000	27,520,000	31.42 %	60,080,000
	000176. Belanja Tunjangan Fungsional PPPK (gaji ke 13)	7,300,000	0	0	0	0	0.00 %	7,300,000
	000177. Belanja Tunjangan Fungsional PPPK (gaji ke 14)	7,300,000	0	0	5,760,000	5,760,000	78.90 %	1,540,000
511625	Belanja Tunjangan Beras PPPK	78,068,000	0	17,960,160	9,438,740	27,398,900	35.10 %	50,669,100
	000178. Belanja Tunj Beras PPPK	66,916,000	0	17,960,160	5,648,760	23,608,920	35.28 %	43,307,080
	000179. Belanja Tunj Beras PPPK (gaji ke 13)	5,576,000	0	0	0	0	0.00 %	5,576,000
	000180. Belanja Tunj Beras PPPK (gaji ke 14)	5,576,000	0	0	3,789,980	3,789,980	67.97 %	1,786,020
511628	Belanja Uang Makan PPPK	273,768,000	0	19,992,000	18,315,000	38,307,000	13.99 %	235,461,000
	000181. Belanja Uang Makan PPPK	273,768,000	0	19,992,000	18,315,000	38,307,000	13.99 %	235,461,000
511633	Belanja Tunjangan Umum PPPK	28,490,000	0	7,080,000	3,343,332	10,423,332	36.59 %	18,066,668
	000182. Tunjangan Umum PPPK	24,420,000	0	7,080,000	2,360,000	9,440,000	38.66 %	14,980,000
	000183. Tunjangan Umum PPPK (gaji ke 13)	2,035,000	0	0	0	0	0.00 %	2,035,000
	000184. Tunjangan Umum PPPK (gaji 14)	2,035,000	0	0	983,332	983,332	48.32 %	1,051,668
512211	Belanja Uang Lembur	35,000,000	0	21,007,000	0	21,007,000	60.02 %	13,993,000
	000185. Uang Lembur	35,000,000	0	21,007,000	0	21,007,000	60.02 %	13,993,000
512212	Belanja Uang Lembur PPPK	35,000,000	0	14,138,000	0	14,138,000	40.39 %	20,862,000
	000186. Uang Lembur	35,000,000	0	14,138,000	0	14,138,000	40.39 %	20,862,000
512411	Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	2,148,536,000	0	148,609,975	325,727,346	474,337,321	22.08 %	1,674,198,679
	000187. Tunjangan Kinerja	2,148,536,000	0	148,609,975	325,727,346	474,337,321	22.08 %	1,674,198,679
512414	Belanja Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	1,507,132,000	0	104,183,478	177,539,352	281,722,830	18.69 %	1,225,409,170
	000188. Tunjangan Kinerja	1,507,132,000	0	104,183,478	177,539,352	281,722,830	18.69 %	1,225,409,170
002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	3,676,776,000	0	1,943,732,219	184,810,967	2,128,543,186	57.89 %	1,548,232,814

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2026

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Maret 2026

Kementerian : 032 KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Unit Organisasi 03 DITJEN PERIKANAN TANGKAP
Satuan Kerja : 427661 PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA TERNATE

Hal 13 dari 16

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2026				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
002.OA Langganan Daya dan Jasa	1,192,012,000	0	189,399,712	72,781,567	262,181,279	21.99 %	929,830,721
521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	6,400,000	0	401,400	0	401,400	6.27 %	5,998,600
000189. Biaya Pos	6,400,000	0	401,400	0	401,400	6.27 %	5,998,600
522111 Belanja Langganan Listrik	1,139,912,000	0	180,900,337	68,384,770	249,285,107	21.87 %	890,626,893
000190. Listrik	1,139,912,000	0	180,900,337	68,384,770	249,285,107	21.87 %	890,626,893
522113 Belanja Langganan Air	2,000,000	0	700,000	0	700,000	35.00 %	1,300,000
000290. Langganan Air di Pelabuhan Binaan	2,000,000	0	700,000	0	700,000	35.00 %	1,300,000
522119 Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	43,700,000	0	7,397,975	4,396,797	11,794,772	26.99 %	31,905,228
000191. Telpo/Internet	43,700,000	0	7,397,975	4,396,797	11,794,772	26.99 %	31,905,228
002.OB Pemeliharaan Kantor	122,512,000	0	13,726,109	4,627,700	18,353,809	14.98 %	104,158,191
523111 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	31,512,000	0	0	509,100	509,100	1.62 %	31,002,900
000192. Bangunan Gedung Kantor Permanen	5,000,000	0	0	0	0	0.00 %	5,000,000
000193. Bangunan Gedung Pertemuan Permanen	5,000,000	0	0	0	0	0.00 %	5,000,000
000194. Bangunan TPI Semi Permanen	5,000,000	0	0	0	0	0.00 %	5,000,000
000276. Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Ibadah Lainnya	16,512,000	0	0	509,100	509,100	3.08 %	16,002,900
523121 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	91,000,000	0	13,726,109	4,118,600	17,844,709	19.61 %	73,155,291
000196. Pemeliharaan Genset 200 KVA	2,500,000	0	0	0	0	0.00 %	2,500,000
000197. Pemeliharaan Forklift	1,000,000	0	0	0	0	0.00 %	1,000,000
000199. Pemeliharaan PC Unit	5,000,000	0	0	0	0	0.00 %	5,000,000
000200. Pemeliharaan Laptop	2,500,000	0	0	508,461	508,461	20.34 %	1,991,539
000203. Pemeliharaan AC Sentral	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000	100.00	0
000204. Pemeliharaan AC Split	6,000,000	0	3,300,000	150,000	3,450,000	57.50 %	2,550,000
000205. Pemeliharaan Drone	1,000,000	0	0	0	0	0.00 %	1,000,000
000206. Pemeliharaan Portal	2,000,000	0	0	1,478,739	1,478,739	73.94 %	521,261
000208. Pemeliharaan Alat Pemadam	7,000,000	0	0	0	0	0.00 %	7,000,000
000212. Pemeliharaan Sound System	4,000,000	0	0	0	0	0.00 %	4,000,000

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2026

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Maret 2026

Kementerian : 032 KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Unit Organisasi 03 DITJEN PERIKANAN TANGKAP
Satuan Kerja : 427661 PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA TERNATE

Hal 14 dari 16

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2026				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
000215. Biaya Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Roda 2 (Maluku Utara)	5,000,000	0	292,359	0	292,359	5.85 %	4,707,641
000216. Pemeliharaan Kendaraan Roda 3	5,000,000	0	300,000	444,000	744,000	14.88 %	4,256,000
000217. Biaya Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Roda 4 (Maluku Utara)	30,000,000	0	5,415,000	1,402,400	6,817,400	22.72 %	23,182,600
000218. Biaya Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Roda 6	15,000,000	0	338,750	0	338,750	2.26 %	14,661,250
000219. Eksploitasi dan Pemeliharaan Mesin Potong Rumput	1,000,000	0	780,000	135,000	915,000	91.50 %	85,000
000291. Pemeliharaan VideoTron	1,000,000	0	300,000	0	300,000	30.00 %	700,000
002.0D Pembayaran terkait pelaksanaan Operasional Kantor	2,362,252,000	0	1,740,606,398	107,401,700	1,848,008,098	78.23 %	514,243,902
521111 Belanja Keperluan Perkantoran	2,116,973,000	0	1,723,950,398	74,570,800	1,798,521,198	84.96 %	318,451,802
000222. Langganan Air Mineral (Galon)	2,400,000	0	436,000	0	436,000	18.17 %	1,964,000
000224. Biaya Pertemuan dan Jamuan Tamu	76,538,000	0	2,393,350	19,890,800	22,284,150	29.12 %	54,253,850
000225. Fotocopy dan penggandaan	1,500,000	0	0	0	0	0.00 %	1,500,000
000226. Biaya Inventaris dan Perlengkapan Kantor	20,775,000	0	2,125,100	1,998,000	4,123,100	19.85 %	16,651,900
000227. Snack Rapat Biasa Kegiatan Jumat Bersih	8,211,000	0	500,000	0	500,000	6.09 %	7,711,000
000272. PPPK Paruh Waktu	316,092,000	0	52,682,000	52,682,000	105,364,000	33.33 %	210,728,000
000273. Honorarium Kerohanian	400,000	0	0	0	0	0.00 %	400,000
000275. Gaji 13/THR PPPK Paruh Waktu	25,193,000	0	0	0	0	0.00 %	25,193,000
000277. Biaya Outsorcing Petugas Keamanan	651,651,000	0	651,602,820	0	651,602,820	99.99 %	48,180
000278. Biaya Outsorcing Petugas Kebersihan	733,044,000	0	733,042,368	0	733,042,368	100.00	1,632
000279. Biaya Outsourcing Pramubakti	49,723,000	0	49,722,920	0	49,722,920	100.00	80
000280. Biaya Outsourcing Petugas Layanan Informasi	49,723,000	0	49,722,920	0	49,722,920	100.00	80
000281. Biaya Outsourcing Mekanik	49,723,000	0	49,722,920	0	49,722,920	100.00	80
000282. Biaya Outsorcing Petugas Pas Masuk	132,000,000	0	132,000,000	0	132,000,000	100.00	0
521115 Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	113,520,000	0	9,460,000	9,460,000	18,920,000	16.67 %	94,600,000
000233. Honorarium Anggota Pengelola Pnbp (pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar)	19,800,000	0	1,650,000	1,650,000	3,300,000	16.67 %	16,500,000
000235. Honorarium Anggota/Petugas (UAPPA/Barang-EI)	4,800,000	0	400,000	400,000	800,000	16.67 %	4,000,000
000236. Honorarium Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran	21,600,000	0	1,800,000	1,800,000	3,600,000	16.67 %	18,000,000

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2026

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Maret 2026

Kementerian : 032 KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Unit Organisasi 03 DITJEN PERIKANAN TANGKAP
Satuan Kerja : 427661 PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA TERNATE

Hal 15 dari 16

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2026				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
(pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar)	21,600,000	0	1,800,000	1,800,000			18,000,000
000237. Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar)	21,000,000	0	1,750,000	1,750,000	3,500,000	16.67 %	17,500,000
000238. Honorarium Pejabat Penguji Tagihan Penandatanganan Spm (pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar)	9,000,000	0	750,000	750,000	1,500,000	16.67 %	7,500,000
000239. Honorarium Bendahara Pengeluaran (pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar)	7,920,000	0	660,000	660,000	1,320,000	16.67 %	6,600,000
000240. Honorarium Staf Pengelola (pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar)	17,640,000	0	1,470,000	1,470,000	2,940,000	16.67 %	14,700,000
000242. Honorarium Atasan Langsung Bendahara Pengelola Pnbp (pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar)	6,480,000	0	540,000	540,000	1,080,000	16.67 %	5,400,000
000243. Honorarium Bendahara Pengelola Pnbp (pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar)	5,280,000	0	440,000	440,000	880,000	16.67 %	4,400,000
521119 Belanja Barang Operasional Lainnya	24,300,000	0	1,200,000	1,200,000	2,400,000	9.88 %	21,900,000
000245. Biaya Langganan Lisensi Aplikasi Video Conference	4,500,000	0	0	0	0	0.00 %	4,500,000
000246. Blaya Langganan Lisensi Aplikasi Canva	800,000	0	0	0	0	0.00 %	800,000
000253. Pembuangan Sampah Ke TPA	14,400,000	0	1,200,000	1,200,000	2,400,000	16.67 %	12,000,000
000254. Blaya Langganan Lisensi Aplikasi Penyimpanan Online	4,600,000	0	0	0	0	0.00 %	4,600,000
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	22,209,000	0	0	683,400	683,400	3.08 %	21,525,600
000255. ATK	5,000,000	0	0	683,400	683,400	13.67 %	4,316,600
000256. Bahan Komputer	17,209,000	0	0	0	0	0.00 %	17,209,000
522141 Belanja Sewa	33,600,000	0	5,500,000	2,750,000	8,250,000	24.55 %	25,350,000
000257. Sewa Bangunan Pelayanan Kesyahbandaran di Bacan	20,400,000	0	3,300,000	1,650,000	4,950,000	24.26 %	15,450,000
000258. Sewa Bangunan Pelayanan Kesyahbandaran di Dufa-Dufa	13,200,000	0	2,200,000	1,100,000	3,300,000	25.00 %	9,900,000
523133 Belanja Pemeliharaan Jaringan	51,650,000	0	496,000	18,737,500	19,233,500	37.24 %	32,416,500
000267. Pemeliharaan Jaringan Internet	24,800,000	0	116,000	16,600,000	16,716,000	67.40 %	8,084,000
000268. Pemeliharaan Pompa dan Instalasi Air Bersih	15,300,000	0	0	2,137,500	2,137,500	13.97 %	13,162,500
000269. Pemeliharaan Jaringan Listrik	11,550,000	0	380,000	0	380,000	3.29 %	11,170,000
EBB Layanan Sarana dan Prasarana Internal	112,424,000	0	0	0	0	0.00 %	112,424,000

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2026

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Maret 2026

Kementerian : 032 KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Unit Organisasi : 03 DITJEN PERIKANAN TANGKAP
Satuan Kerja : 427661 PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA TERNATE

Hal 16 dari 16

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2026				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
EBB.951 Layanan Sarana Internal	25,000,000	0	0	0	0	0.00 %	25,000,000
051 Pengadaan sarana perkantoran	25,000,000	0	0	0	0	0.00 %	25,000,000
051.0A Fasilitas Penunjang	25,000,000	0	0	0	0	0.00 %	25,000,000
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin	25,000,000	0	0	0	0	0.00 %	25,000,000
000271. Pengadaan Pompa	25,000,000	0	0	0	0	0.00 %	25,000,000
EBB.971 Layanan Prasarana Internal	87,424,000	0	0	0	0	0.00 %	87,424,000
051 Pengadaan dan Rehabilitasi prasarana perkantoran	87,424,000	0	0	0	0	0.00 %	87,424,000
051.0A Pembangunan dan Pengembangan Prasarana Pelabuhan	87,424,000	0	0	0	0	0.00 %	87,424,000
534141 Belanja Penambahan Nilai Jalan dan Jembatan	87,424,000	0	0	0	0	0.00 %	87,424,000
000270. Konstruksi Peningkatan Jalan	87,424,000	0	0	0	0	0.00 %	87,424,000

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.